



LAPORAN AKTUALISASI

PERCEPATAN PROSES PENYUSUNAN APLIKASI PETA RISIKO PADA AREA PENGAWASAN INSPEKTORAT II

Disusun Oleh:

NAMA : FAISAL RYADI. S.E.
NIP : 19891123 201903 1 001
INSTANSI : INSPEKTORAT II

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

2019



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI

PERCEPATAN PROSES PENYUSUNAN APLIKASI PETA RISIKO PADA AREA PENGAWASAN INSPEKTORAT II

NAMA : FAISAL RIYADI. S.E.
NIP : 19891123 201903 1 001
INSTANSI : INSPEKTORAT II

Jakarta, September 2019

Menyetujui,
Mentor



Faisal Riyadi, S.E.
NIP: 198911232019031001

Mengetahui,
Coach



Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si
NIP: 197212031998032003

Menyetujui,
Mentor



Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P.
NIP: 196907151999031004

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG.....	7
1. Visi Misi Unit Kerja Eselon II, Struktur Organisasi, dan Penjelasan Tugas dan Fungsi.....	7
2. Kondisi Saat Ini.....	12
3. Kondisi yang diharapkan	13
4. Identifikasi Isu	14
5. Teknik Analisis (USG)	15
6. Gagasan Pemecahan Isu.....	16
B. TUJUAN.....	16
C. MANFAAT	16
BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI	17
A. RANCANGAN AKTUALISASI.....	17
B. CAPAIAN KEGIATAN AKTUALISASI.....	26
BAB III PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN	29
A. KEGIATAN:.....	29
B. STAKEHOLDER	43
C. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN	43
D. TIME SCHEDULE	44
BAB IV PENUTUP	45
A. KESIMPULAN	45
B. SARAN.....	45
LAMPIRAN KEGIATAN.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi	8
Tabel 2. Penilaian Prioritas Isu Dengan Metode USG.....	15
Tabel 3. Kegiatan Aktualisasi	19
Tabel 4. Capaian Kegiatan Aktualisasi	27
Tabel 5. Analisis Dampak Internal dan Eksternal Jika Kegiatan Tidak Dilakukan.....	45
Tabel 6. Timeline Rencana Kegiatan Aktualisasi.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Koordinasi dan Presentasi Singkat dengan Inspektur Utama merangkap Plt. Inspektur II	30
Gambar 2. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Aktualisasi.....	31
Gambar 3. Koordinasi dengan BDTI.....	31
Gambar 4. Bimbingan Pertama dengan Coach.....	32
Gambar 5. Rapat Internal dengan Jajaran Inspektorat II.....	33
Gambar 6. Konsep Aplikasi Peta Risiko	34
Gambar 7. Konsep Kriteria Faktor Risiko.....	34
Gambar 8. Surat Permintaan Data ke Biro Perencanaan dan Keuangan	35
Gambar 9. Surat Permintaan Data ke Biro Kepegawaian	35
Gambar 10. Pengiriman Rancangan Aplikasi Peta Risiko via Email DPR RI kepada BDTI.....	36
Gambar 11. Surat Pembuatan Cloud Inspektorat II	37
Gambar 12. Rapat Koordinasi Tahap II dengan Pihak BDTI.....	38
Gambar 13. Daftar Ukuran Risiko.....	38
Gambar 14. Daftar Kriteria Risiko.....	39
Gambar 15. Daftar Peta Risiko	39
Gambar 16. Laporan Peta Risiko Per Tahun 1	40
Gambar 17. Laporan Peta Risiko Per Tahun 2.....	40
Gambar 18. Laporan Peta Risiko Per Satker.....	41
Gambar 19. Statistik Anggaran Yang Dikelola.....	41
Gambar 20. Statistik Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.....	42
Gambar 21. Statistik Kepegawaian.....	42
Gambar 22. Uji Coba Aplikasi Peta Risiko dan Penyebaran Form Evaluasi.	43
Gambar 23. Analisa Form Evaluasi.....	43
Gambar 24. Sosialisasi Aplikasi Peta Risiko di Lingkungan Inspektorat II..	44

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT,

Penyusunan laporan yang berjudul "Percepatan Proses Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II" ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P selaku mentor
2. Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si selaku coach

Laporan ini menyajikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebagai calon Auditor Ahli Pertama di Inspektorat II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta peran dan kedudukan ASN. Laporan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, memperkaya referensi dan literatur bagi pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 16 Agustus 2019

Faisal Riyadi, S.E.

NIP: 19891123 201903 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Visi Misi Unit Kerja Eselon II, Struktur Organisasi, dan Penjelasan Tugas dan Fungsi

a. VISI

Adapun visi dari Inspektorat II selaras dengan visi yang ditetapkan oleh Inspektorat Utama, yaitu:

“Menjadikan Inspektorat II yang Profesional, Independen, Akuntabel, Berintegritas dalam mewujudkan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan”

b. MISI

Sedangkan misi dari Inspektorat II adalah

1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Tata Kelola Keuangan dan Kinerja yang baik di Lingkungan BKD dan Deputi Persidangan
2. Meningkatkan peran Inspektorat II sebagai *Counseling Partner* dan *Quality Assurance* atas sistem pengendalian intern di lingkungan Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan
3. Mewujudkan Aparat Inspektorat II yang Profesional

I. Struktur Organisasi

Tabel 1. Struktur Organisasi



Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pendukung telah diatur keberadaanya dalam Pasal 294 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya berkaitan dengan struktur organisasi diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang Administrasi serta Persidangan dan dalam melaksanakan wewenang tugasnya Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki susunan organisasi, diantaranya yaitu Inspektor Utama.

Inspektorat utama merupakan unsur Aparat Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, diharapkan dapat melaksanakan tugasnya agar Sekretariat Jenderal DPR-RI

berpegang pada asas akuntabilitas dan transparansi untuk membentuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mengimplementasikan tugas tersebut, Inspektorat Utama dibawahnya memiliki unit organisasi Inspektorat II yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Deputi Persidangan dan Badan Keahlian.

Inspektorat II dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman secara teknis dalam mendukung keberadaan Rencana Strategis Inspektorat Utama dan Rencana Strategis Sekretaris Jenderal DPR-RI. Rencana Strategis Inspektorat I untuk memastikan adanya hubungan kerja yang sinergis dengan Inspektorat II. Bagian Tata Usaha dan para Auditor di lingkungan Inspektorat Utama, serta hubungan koordinasi dengan Biro/Pusat atau bagian lain di luar Inspektorat II.

c. Tugas dan Fungsi

Dalam pasal 257 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI disebutkan bahwa "Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Badan Keahlian DPR RI dan Deputi Bidang Persidangan".

Dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 257, Inspektorat UU menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat II;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Inspektorat II;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat II;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat II;
- e. Perumusan kebijakan pengawasan;

- f. Pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- g. Pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- h. Penanganan audit investigasi terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- i. Penanganan pengaduan terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- j. Pendekstasi dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- k. Pelaksanaan peran serta kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kejahatan keuangan;
- l. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- m. Pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan penerapan kode etik pegawai di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- n. Pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SPI);
- o. Pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait;
- p. Pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- q. Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;

- r. Pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
 - s. Pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
 - t. Pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
 - u. Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat II;
 - v. Penyusunan laporan kinerja Inspektorat II;
 - w. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektorat Utama; dan pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat II adalah sebagai berikut:
- 1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan intern.
 - 2. Meningkatkan fungsi pembinaan Sistem Pengendalian Internal dan Penjaminan Mutu oleh Inspektorat II.
 - 3. Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Aparat Inspektorat II.
- e. Sasaran Strategis dari Inspektorat II berujung kepada meningkatnya kualitas dan kuantitas dukungan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian intern Inspektorat II terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan yang transparan dan akuntabel.
- 1. Meningkatnya Kualitas Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II melalui kerja sama dengan pihak eksternal;

2. Meningkatnya Fungsi dan Peran Inspektorat II dalam mewujudkan *Good Government* atas kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan BKD dan Deputi Persidangan;
3. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Profesionalisme Aparat Pengawasan di Inspektorat II.

2. Kondisi Saat Ini

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik politik, ekonomi, dan sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP Pusat dan Daerah. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan peningkatan peranan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung kepemerintahan yang baik terutama berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu dalam bidang keuangan telah ditetapkan paket Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang mendorong penerapan sistem administrasi keuangan negara yang berbasis kinerja serta lebih transparan dan akuntabel.

Inspektorat II sebagai bagian dari Inspektorat Utama adalah unit kerja dengan fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI khusus untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Inspektorat II harus mampu berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjasama dalam hal pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan parlemen. Inovasi dan kreasi tiada henti dibutuhkan untuk dapat menyesuaikan dengan tata kelola pemerintahan yang baru, sebagai contoh Inspektorat Utama saat ini tidak hanya menjadi *watchdog* dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tapi juga sebagai pemberi konsultasi terhadap segala permasalahan yang ada khususnya terhadap kegiatan yang dapat mengarah kepada kegiatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam hal ini rencana kegiatan audit intern tahunan berisi rencana kegiatan audit intern yang berbasis risiko dalam tahun yang bersangkutan serta sumber daya yang diperlukan. Penentuan prioritas kegiatan audit intern harus didasarkan pada evaluasi/penilaian risiko yang dilakukan oleh APIP dan dengan mempertimbangkan prinsip kewajiban menindaklanjuti pelaporan dari masyarakat.

3. Kondisi yang diharapkan

- Inspektorat II pada khususnya harus memiliki peta risiko terhadap audit (Deputi Persidangan II dan Badan Keahlian) yang menjadi tanggung jawab pengawasannya.
- Terwujudnya Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berbasis risiko

- Tercapainya peran Inspektorat II sebagai *Counseling Partner* dan *Quality Assurance* atas Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan.

4. Identifikasi Isu

- a. Belum adanya Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Dalam pelaksanaan kegiatan audit selama ini masih hanya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Irtama sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Inspektor Utama Nomor: IU/01/SETJEN DAN BK DPR_RI/IRTAMA/XI/2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, tetapi itu hanya mencakup garis besar kegiatan pengawasan. Oleh karena itu dibutuhkan pembuatan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

- b. Belum optimalnya penyusunan kebijakan pengawasan dan SOP di Lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, masih terdapat ketumpang tindihan antara tugas pokok dengan tugas mandatori (contoh Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI), sehingga harapan untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, terarah, dan terkoordinasi agak sedikit terhambat.

- c. Belum adanya nilai risiko *auditable units*

Perlu adanya nilai risiko unit-unit yang berada di bawah pengawasan Inspektorat II di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI, seberapa besar risiko yang sering terjadi di tiap unit, seberapa besar risiko yang kemungkinan akan terjadi, sehingga dapat membuat program kerja pengawasan yang berbasis risiko serta meminimalisir terjadinya temuan.

5. Teknik Analisis (USG)

Tabel 2. Penilaian Prioritas Isu Dengan Metode USG

No.	Isu	Kriteria			Total
		U	S	G	
1.	Belum adanya Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI	3	4	3	10
2.	Belum optimalnya penyusunan kebijakan pengawasan dan SOP di Lingkungan Inspektorat Utama Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.	3	4	4	11
3.	Belum adanya nilai risiko <i>auditable units</i>	4	5	5	14

Keterangan:

U= Urgency (Penting)

Range

Skor 5 = Sangat Besar

S = Seriousness (Keseriusan)

Skor 4 = Besar

G = Growth

Skor 3 = Cukup

Skor 2 = Kecil

Skor 1 = Sangat Kecil

Berdasarkan analisis USG di atas, maka isu yang dipilih adalah: isu nomor 3,yaitu Belum adanya nilai risiko *auditable units*.

Deskripsi:

- **Urgency** = Belum terdapatnya peta risiko serta aplikasi yang dapat menunjang input data dari peta risiko tersebut di lingkungan Inspektorat II, sehingga isu ini dianggap sangat penting dan dari sisi urgensi berada pada indikator level 4.
- **Seriousness** = Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat II yang belum berbasis risiko, sehingga perlu segera ditindaklanjuti dengan membuat peta risiko dengan aplikasi

penunjangnya. Penilaian dari sisi *seriousness* berada pada level 5 yang berarti sangat serius.

- **Growth** = Belum adanya *tools* untuk mengukur risiko dari setiap unit yang berada di area pengawasan Inspektorat II, hal ini perlu menjadi perhatian serius karena akan berdampak pada kurang efektifnya sistem dan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat II, hal ini juga akan menjadi isu kontemporer yang dapat terjadi berulang-ulang, sehingga penilaian dari sisi *Growth* berada pada level 5 yang berarti sangat besar kemungkinan isu tersebut akan tumbuh dan berkembang.

6. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan pemecahan isu melalui Teknik USG, maka didapat isu nomor 3, yaitu belum adanya nilai risiko *auditable units*. Oleh karena itu dibutuhkan pemecahan solusi melalui pemikiran saya bersama dengan coach, dan mentor melalui gagasan berjudul "*Percepatan Proses Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II*"

B. TUJUAN

1. Tersusunnya aplikasi peta risiko yang sistematis di lingkungan audit Inspektorat II Setjen dan BK DPR RI.
2. Tercapainya audit yang berbasis risiko.
3. Memberikan kontribusi kepada Inspektorat Utama dalam meningkatkan level Internal Audit Capability Model (IACM).

C. MANFAAT

1. Memudahkan Inspektorat II dalam mengidentifikasi risiko dari setiap audit yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Menjadi landasan bagi Inspektorat II dalam menjalankan audit yang berbasis risiko.
3. Memudahkan koordinasi antara Inspektorat II dengan audit dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. RANCANGAN AKTUALISASI

- Unit Kerja** : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
- Identifikasi Isu** : A. Belum adanya Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
B. Belum optimalnya penyusunan kebijakan pengawasan dan SOP di Lingkungan Inspektorat Utama Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.
C. Belum adanya nilai risiko *auditable units*
- Isu yang Diangkat** : Belum adanya nilai risiko *auditable units*
- Gagasan** : Percepatan Proses Penyusunan Aplikasi Peta
- Pemecahan Isu** : Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II

Tabel 3
Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Penguatan Nilai Organisasi
1	Rapat dengan Internal Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta Persetujuan Pimpinan (Plt Inspektur II) - Penjadwalan waktu rapat ke bagian TU - Pelaksanaan rapat - Pembuatan laporan singkat hasil rapat 	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal rapat yang telah disetujui - Daftar hadir kegiatan rapat - Laporan singkat hasil rapat - Dokumentasi kegiatan 	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Kejelasan ditunjukkan dengan adanya materi rapat dan laporan singkat hasil rapat 2. Etika Publik menjalankan salah satu nilai dasar yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan menggunakan etika sopan santun dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan Inspektorat II 3. Komitmen Mutu Kemauan keras dari adanya kesadaran untuk melakukan perubahan di lingkungan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam melakukan musyawarah 2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam memecahkan suatu masalah 3. Profesional Segala bentuk keputusan yang diambil berdasar pada keahlian 4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab terhadap pengambilan

				Peran dan Kedudukan: <i>Whole of Government</i> terlihat melalui koordinasi dengan atasan	keputusan dalam rapat
2	Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)	<ul style="list-style-type: none"> - Penjadwalan dengan BDTi - Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi - Pembuatan laporan hasil konsultasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan singkat hasil konsultasi - Dokumentasi kegiatan 	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Kejelasan ditunjukkan dengan adanya laporan singkat dan dokumentasi hasil rapat 2. Etika Publik menjalankan salah satu nilai dasar yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan menggunakan etika sopan santun dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan BDTI 3. Komitmen Mutu Kemauan keras dari adanya kesadaran untuk melakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam 2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam memecahkan suatu masalah 3. Profesional Segala bentuk keputusan yang diambil berdasar pada keahlian 4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab terhadap pengambilan

			<p>perubahan di lingkungan kerja</p> <p>Peran dan Kedudukan: <i>Whole of Government</i> terlihat melalui koordinasi lintas instansi antara Inspektorat II dengan BDTI</p>	keputusan dalam rapat
3	Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan aplikasi peta risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta data jumlah seluruh pegawai yang berada di bawah Deputi Persidangan dan Badan Keahlian beserta Analisis Beban Kinerja (ABK) - Meminta data kepada Biro Perencanaan dan Keuangan terkait capaian realisasi anggaran 	<p>- Surat Permintaan Data</p> <p>- Data penunjang terkait penyusunan aplikasi</p> <p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Kejelasan tujuan dalam permintaan data kepada unit lain. 2. Etika Publik menjalankan salah satu nilai dasar yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan menggunakan etika sopan santun dalam berkomunikasi dengan stakeholder terkait. 3. Komitmen Mutu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam melakukan pengumpulan data terkait 2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam pengumpulan data terkait 3. Profesional Pengumpulan data dengan cara menjalin komunikasi dan

		<p>semua unit yang berada di bawah Deputi Persidangan dan Badan Keahlian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan bagian Tata Usaha Inspektorat Utama terkait data tindak lanjut hasil temuan BPK 	<p>Efisiensi dan efektifitas dalam pengumpulan data penunjang sebagai bahan penyusunan aplikasi.</p> <p>Peran dan Kedudukan: <i>Whole of Government</i> terlihat melalui koordinasi dengan unit lain.</p>	<p>koordinasi yang profesional</p> <p>4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab terhadap data yang sudah diberikan oleh pihak lain</p>
4	Membuat peta risiko beserta aplikasi pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan data sesuai jenis dan periode - Pengolahan data di dalam Microsoft Excel - Membuat peta risiko berdasarkan hasil pengolahan data tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem peta risiko yang dapat digunakan dalam menunjang kegiatan pengawasan tahunan - Data risiko yang tersusun rapi 	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Bertanggung jawab memenuhi pertanggung jawaban sebagai bukti hasil pelaksanaan Latihan Dasar. 2. Etika Publik Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak lain <p>1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam membuat aplikasi peta risiko</p> <p>2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam penyusunan</p>

				<p>dalam proses pelaksanaan.</p> <p>3. Komitmen mutu Menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan orientasi mutu pada penyusunan aplikasi peta risiko</p> <p>Peran dan Kedudukan: <i>Whole of Government</i> Kolaborasi antar unit dalam membuat suatu inovasi yang baru</p> <p>Pelayanan Publik Diharapkan aplikasi peta risiko tersebut dapat meningkatkan standar dan mutu pengawasan, sehingga akuntabilitas kinera Setjen dan BK DPR RI dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik</p>	<p>aplikasi peta risiko</p> <p>3. Profesional Penyusunan aplikasi peta risiko yang berdasar pada masukan dari para ahli</p> <p>4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab terhadap penyusunan aplikasi peta risiko</p>
5	Melakukan uji coba dan Evaluasi Peta	- Meminta pegawai	- Kegiatan uji coba - Kemudahan dan kesulitan dalam	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <p>1. Akuntabilitas</p>	<p>1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral</p>

	<p>Risiko beserta aplikasi pendukungnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat II untuk uji coba - Meminta pegawai Inspektorat II untuk mencari risiko sebagai bekal pengawasan dari audit yang akan diawasinya - Membuat form evaluasi - Menyebar form evaluasi kepada user yang melakukan uji coba - Menganalisa hasil evaluasi 	<p>mengoperasikan aplikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Form evaluasi - Masukan dari user - Hasil evaluasi 	<p>Bertanggung jawab terhadap hasil, serta meminta feedback untuk penyempurnaan hasil.</p> <p>2. Etika publik</p> <p>Berkomunikasi dengan baik ketika meminta feedback pendapat terkait dengan produk yang sudah kita hasilkan.</p> <p>3. Komitmen mutu</p> <p>(Menjaga nilai mutu dari aplikasi peta risiko demi tercapainya suatu produk sistem yang efektif, efisien dan terjaga kualitas mutunya).</p> <p>Peran dan Kedudukan:</p> <p><i>Whole of Government</i></p> <p>Kolaborasi dalam hal penyempurnaan aplikasi peta risiko .</p> <p>Pelayanan Publik</p>	<p>dalam melakukan uji coba hasil penyusunan evaluasi peta risiko</p> <p>2. Akuntabel</p> <p>Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam melaksanakan uji coba aplikasi peta risiko</p> <p>3. Profesional</p> <p>Meminta masukan dari para ahli terkait uji coba aplikasi peta risiko</p> <p>4. Integritas</p> <p>Memiliki kejujuran dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan uji coba aplikasi peta risiko</p>
--	--	--	--	---

				Mengukur seberapa besar manfaat dari suatu inovasi sistem yang telah saya coba realisasikan.	
6	Melaporkan hasil akhir kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan laporan - Sosialisasi materi aplikasi peta risiko di lingkungan Inspektorat II 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil kegiatan - Pemanfaatan aplikasi peta risiko di lingkungan Inspektorat II - Laporan singkat hasil sosialisasi akhir - Dokumentasi kegiatan 	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Menerapkan nilai-nilai transparansi dan sikap bertanggung jawab terhadap hasil akhir dari suatu pekerjaan. 2. Nasionalisme Penyusunan aplikasi peta risiko yang dapat bermanfaat bagi kepentingan Bersama. 3. Etika publik Berkomunikasi dengan baik ketika menyampaikan laporan hasil akhir dari suatu gagasan. 4. Komitmen mutu Menjaga nilai mutu dari aplikasi peta risiko demi tercapainya suatu produk sistem yang efektif, efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam pelaporan hasil rancangan aktualisasi kegiatan 2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam pelaporan hasil rancangan aktualisasi kegiatan 3. Profesional Melaksanakan pelaporan hasil rancangan aktualisasi dengan meminta

			<p>dan terjaga kualitas mutunya.</p> <p>5. Anti Korupsi</p> <p>Suatu output hasil yang dapat dijadikan <i>tools</i> untuk mencegah praktik menyimpang dan mengarah kepada indikasi korupsi.</p> <p>Peran dan Kedudukan: <i>Whole of Government</i> Koordinasi antar unit dalam penyempurnaan hasil</p>	<p>masukan dari para rekan auditor yang ahli di bidangnya</p> <p>4. Integritas</p> <p>Memiliki kejujuran dan tanggung jawab.</p>
--	--	--	---	--

B. CAPAIAN KEGIATAN AKTUALISASI

Tabel 4

Capaian Kegiatan Aktualisasi

Milestone	No	Kegiatan Utama	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
Rapat dengan Internal Inspektorat II	1	Presentasi singkat rancangan kegiatan di hadapan Bpk. Inspektur Utama	Selasa, 23 Juli 2019	Lampiran 1 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan
	2	Pembuatan Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan dan sudah ditandatangani oleh Bpk. Inspektur Utama	Selasa, 23 Juli 2019	Lampiran 2 <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Aktualisasi
	3	Bimbingan Pertama dengan coach Ibu Heny Widyaningsih	Selasa, 23 Juli 2019	Lampiran 3 <ul style="list-style-type: none"> • Kartu Kendali • Foto Kegiatan
	4	Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II	Kamis, 25 Juli 2019	Lampiran 4 <ul style="list-style-type: none"> • Undangan Rapat • Absensi Rapat • Laporan Singkat Rapat • Bahan Rapat • Foto Kegiatan
	5	Rapat Koordinasi dengan BDTI terkait Rancangan Aktualisasi CPNS Angkatan 2	Selasa, 23 Juli 2019	Lampiran 5 <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Singkat • Foto Kegiatan
	6	Mengirim rancangan aplikasi peta risiko ke BDTI cc. Sasmito	Selasa, 30 Juli 2019	Lampiran 6 <ul style="list-style-type: none"> • Screenshot Email • Rancangan Aplikasi Peta Risiko

Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan aplikasi peta risiko	7	Membuat dan mengirimkan surat permintaan data Anggaran yang dikelola oleh 10 biro di bawah pengawasan Inspektorat II ke Biro Perencanaan dan Keuangan	Senin, 29 Juli 2019	Lampiran 7 <ul style="list-style-type: none"> • Nota Dinas Permintaan Data
	8	Membuat dan mengirimkan surat permintaan data Analisis Beban Kinerja (ABK) ke Biro Kepegawaian	Senin, 29 Juli 2019	Lampiran 8 <ul style="list-style-type: none"> • Nota Dinas Permintaan Data
	9	Membuat dan mengirimkan surat permintaan pembuatan akun cloud ke Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) untuk Inspektorat II	Rabu, 31 Juli 2019	Lampiran 9 <ul style="list-style-type: none"> • Nota Dinas Permintaan Pembuatan Cloud Inspektorat II
	10	Penerimaan data ABK 2017-2019	Jumat, 2 Agustus 2019	Lampiran 10 <ul style="list-style-type: none"> • Screenshot Email • Data ABK 2017-2018
	11	Koordinasi dengan TU ITTAMA terkait Aplikasi Peta Risiko dan Permintaan data TLHP BPK	Kamis, 8 Agustus 2019	Lampiran 11 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan • Data TLHP BPK
	12	Penerimaan Data Pagu Anggaran dari Aplikasi Sincan Perencanaan cc. Mas Deni	Kamis, 15 Agustus 2019	Lampiran 12 <ul style="list-style-type: none"> • Screenshot Data Pagu Anggaran 10 Biro/Unit/Pusat di Bawah Pengawasan Inspektorat II
	13	Pelaksanaan Pembuatan Cloud Irda	Kamis, 8 Agustus 2019	Lampiran 13 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan

aplikasi pendukungnya	14	Rapat Pemaparan Hasil Pekerjaan Aktualisasi oleh BDTI	Rabu, 7 Agustus 2019	Lampiran 14 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan
	15	Input data sesuai jenis periode, pengolahan data di dalam aplikasi peta risiko	Rabu, 7 Agustus 2019	Lampiran 15 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan • Screenshot Aplikasi
	16	Finalisasi Aplikasi Peta Risiko Tahap I dengan BDTI	Kamis, 8 Agustus 2019	Lampiran 16 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan
	17	Bimbingan Kedua Bu Henny	Jumat, 9 Agustus 2019	Lampiran 17 <ul style="list-style-type: none"> • Kartu Kendali • Foto Kegiatan
	18	Finalisasi Aplikasi Peta Risiko Tahap II dengan BDTI	Selasa, 13 Agustus 2019	Lampiran 18 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan
Melakukan uji coba dan evaluasi peta risiko beserta aplikasi pendukungnya	19	Uji coba peta risiko serta penyebaran form evaluasi	Kamis, 22 Agustus 2019	Lampiran 19 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan • Form Evaluasi
	20	Menerima dan menganalisa hasil evaluasi yang telah diisi	Kamis, 22 Agustus 2019	Lampiran 20 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan • Form Evaluasi yang telah diisi oleh auditor Inspektorat II •
Melaporkan hasil akhir kegiatan	21	Sosialisasi aplikasi peta risiko di Lingkungan Inspektorat II	Senin, 26 Agustus 2019	Lampiran 21 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan • Undangan Rapat • Absensi Rapat • Laporan Singkat

BAB III PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN

A. KEGIATAN:

Kegiatan 1: Presentasi Singkat Rancangan Kegiatan di Hadapan Bpk. Inspektur Utama merangkap Plt. Inspektur II dan Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi

Langkah pertama yang dilaksanakan oleh penulis setelah melaksanakan sidang akhir rancangan di Wisma Giryia Sabha Kopo adalah menghadap dan melaksanakan presentasi singkat di hadapan Plt. Inspektur II yaitu Bpk. Drs. Setyanta Nugraha, M.M. Hal ini dilakukan agar pucuk pimpinan mengetahui, penulis akan menjalankan habituasi selama 30 hari di unit Inspektorat II.



Gambar 1: Koordinasi dan Presentasi Singkat dengan Inspektur Utama merangkap Plt. Inspektur II

Penulis berencana untuk mengaktualisasikan hasil rancangan penulis yang berjudul "Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II" dimana hal tersebut beranjak dari 3 isu yang dianggap *urgent* oleh penulis yang berada di dalam unit Inspektorat II itu sendiri. Isu yang pertama adalah belum adanya Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, yang kedua belum optimalnya penyusunan kebijakan pengawasan dan SOP di lingkungan Inspektorat Utama Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, dan yang ketiga belum adanya nilai risiko *auditable units*. Untuk memilih salah satu dari ketiga isu tersebut dilakukan teknik

analisis *Urgency, Seriousness, Growth (USG)* yang pada akhirnya mengarah kepada isu nomor 3 yaitu belum adanya nilai risiko *auditable units*, di samping itu juga penulis sudah berkordinasi dan melaksanakan konsultasi terhadap mentor terkait pemilihan isu tersebut. Untuk lebih menunjang fleksibilitas dalam pelaksanaan habituasi sebagai dasar koordinasi dengan instansi lain, maka penulis pun membuat Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Aktualisasi yang ditandatangani oleh Bpk Plt. Inspektur II pada hari tersebut:

Step kedua dalam pelaksanaan percepatan penyusunan aplikasi peta risiko dilanjutkan dengan kegiatan koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) yaitu dengan Bapak Airlangga Eka Wardhana, S. Kom., M.T.I., yang dilakukan pada hari Selasa, Tanggal 23 Juli 2019 di ruang Rapat Pusdiklat lantai 4 gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dalam koordinasi dengan pihak BDTI ini dilakukan secara kolektif dengan 15 peserta CPNS Angkatan II Golongan III Tahun 2019 yang mempunyai rencana aktualisasi secara khusus berhubungan dengan pihak BDTI.

Dalam koordinasi tersebut penulis menyampaikan maksud dan tujuan dari proyek aktualisasi yang akan dilaksanakan dimana penulis bermaksud membuat suatu aplikasi khusus terkait peta risiko pada area pengawasan Inspektorat II dengan sistem operasional mengadopsi beberapa fungsi dari Microsoft Excel. Bapak Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, M.T.I., sebagai perwakilan dari pihak BDTI menjelaskan bahwa pembuatan aplikasi peta risiko bisa saja dilakukan dan tentunya akan sangat bermanfaat di era digital saat ini dalam memudahkan suatu pekerjaan. Penulis juga menambahkan akan ada beberapa input data yang akan dimasukan ke dalam aplikasi tersebut dan akan melalui proses kalkulasi serta pengelompokan ke dalam



Gambar 2: Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Aktualisasi



Gambar 3: Koordinasi dengan BDTI

sebuah nilai yang berdasar pada kriteria yang ditentukan pada saat awal. Aplikasi ini akan sangat bermanfaat sekali bagi para auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, dan memudahkan dalam hal record dan input data terkait peta risiko dari sudut pandang auditor, sehingga para auditor dapat 'terdantu untuk' merumuskan Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) berbasis risiko dan juga dalam melaksanakan kegiatan audit yang berbasis risiko.

Dalam pembahasan lebih lanjut terkait percepatan penyusunan aplikasi peta risiko pada area pengawasan Inspektorat II yang mana dimulai dengan presentasi singkat rancangan kegiatan di hadapan Inspektur Utama merangkap Plt. Inspektur II, koordinasi dengan pihak Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) serta bimbingan pertama dengan coach Ibu Heny Widyaningsih merupakan penerapan nilai ***whole of government (WoG)*** sebagai hubungan lintas sektor Bidang untuk menciptakan sistem pengawasan internal pada area pengawasan Inspektorat II. Adanya aplikasi peta risiko merupakan inovasi untuk memberikan kemudahan aksesibilitas bagi internal Inspektorat II dalam memberikan pelayanan dan tanggung jawab kepada pimpinan dalam penentuan unit kerja di bawah pengawasan Inspektorat II mana yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan kegiatan pengawasan di dalamnya, hal ini merupakan cerminan dari nilai **akuntabilitas dan komitmen mutu** yang ditanamkan di unit Inspektorat II dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan lain memetakan risiko dari sudut pandang auditor terhadap unit-unit yang berada di bawah pengawasannya.



Gambar 4: Bimbingan Pertama dengan coach

Kegiatan 2: Melaksanakan Rapat Internal dengan Jajaran Inspektorat II

Kegiatan pertama ini diawali dengan melaksanakan rapat internal dengan jajaran Inspektorat II yang terdiri dari para auditor madya, utama, dan pertama serta CPNS yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 yang bertempat di Ruang Rapat Inspektorat II Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, rapat internal dilakukan dalam pertemuan yang bersifat informal dan membahas beberapa hal yang terkait dengan Percepatan Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II.



Gambar 5: Rapat Internal dengan Jajaran Inspektorat II

Tantangan utama yang dihadapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah mengalokasikan sumber daya audit yang terbatas dalam menentukan klien yang akan dievaluasi dengan cara yang paling efektif. Adanya keterbatasan ini menyebabkan APIP harus menetapkan alokasi sumber daya dengan memfokuskan audit pada hal-hal yang signifikan dan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Audit intern berbasis risiko merupakan sebuah metodologi yang menghubungkan audit intern dengan kerangka manajemen risiko keseluruhan organisasi pemerintahan di mana auditor tersebut bertugas. Perencanaan audit intern berbasis risiko didasarkan pada tujuan organisasi birokrasi pemerintahan serta pelaksanaan audit yang memberikan keyakinan bahwa, melalui pengendalian intern, seluruh risiko yang mengancam tujuan instansi/lembaga pemerintah telah dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima sehingga tujuan dapat tercapai. Perencanaan audit intern berbasis risiko memungkinkan APIP untuk memberikan jaminan atau asurans kepada pimpinan instansi/lembaga pemerintah bahwa proses manajemen risiko telah menghasilkan tata kelola risiko yang efektif dan telah mempertimbangkan selera risiko yang ditetapkan. Perencanaan audit intern berbasis risiko merupakan perluasan dan penyempurnaan dari

sistem audit tradisional yang lebih menekankan audit pada pengendalian intern semata dan melaporkan kecukupan dan efektivitas dari pengendalian intern saja. Untuk itu dibutuhkan suatu peta risiko dari sudut pandang auditor sebagai langkah awal untuk mencapai audit intern berbasis risiko.

Dalam pembahasan konsep penyusunan aplikasi peta risiko pada area pengawasan inspektorat II para auditor di jajaran inspektorat II sangat mendukung dan siap membantu dalam mensukseskan aktualisasi yang akan diimplementasikan oleh penulis. Dalam rapat konsolidasi internal ini menghasilkan beberapa kesepakatan bahwa akan dibentuk sebuah aplikasi peta risiko pada area pengawasan inspektorat II dengan memakai tiga faktor risiko yaitu, dilihat dari sudut pandang anggaran yang dikelola oleh 10 Biro yang berada di bawah pengawasan Inspektorat II, jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Analisis Beban Kinerja (ABK) dilihat dari selisih dari jumlah pegawai yang dibutuhkan dengan jumlah pemangku kepentingan. Berikut konsep aplikasi peta risiko yang dihasilkan melalui persetujuan konsolidasi internal Inspektorat II:

PETA RISIKO 2019												
NO	KODE UNIT	UNIT / BIRO	ANGGARAN 2019			TLHP BPK			SCAF			RISIKO
			TOTAL	URANGAN	BOBOT	URANGAN	BOBOT	JUMLAH PENGAWASAN	RESUTUTASI PEGAWAI	SELISIH	URANGAN	
1	5783	Biro Perilenggan I	472.103.621.000	Di atas 100 Miliar	4	80% atau lebih	1	152	271	129	101-200	1
2	5782	Biro Perilenggan II	240.806.434.000	Di atas 100 Miliar	4	80% atau lebih	1	54	46	32	0-50	1
3	5783	Biro Kerjasama Antar Parlemen	88.010.872.000	51-100 Miliar	3	80% atau lebih	1	41	52	11	0-50	1
4	5784	Biro Kesekreratariat Pengawas	314.870.261.000	Di atas 100 Miliar	4	80% atau lebih	1	105	144	39	0-50	1
5	5785	Biro Penyelektaran Parlemen	185.952.881.000	Di atas 100 Miliar	4	80% atau lebih	1	55	350	271	Elas 200	4
6	5796	Pusat Perancangan UU	17.807.702.000	10-50 Miliar	2	80% atau lebih	1	66	81	15	0-50	1
7	5797	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Pelaksanaan UU	12.785.956.000	10-50 Miliar	2	80% atau lebih	1	23	35	12	0-50	1
8	5798	Pusat Kajian Anggaran	5.254.830.000	Di bawah 10 Miliar	1	80% atau lebih	1	27	47	20	0-50	1
9	5799	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	3.013.833.000	Di bawah 10 Miliar	1	80% atau lebih	1	15	13	8	0-50	1
10	5800	Pusat Penelitian	14.856.277.009	10-50 Miliar	2	80% atau lebih	1	96	112	16	0-50	1

Gambar 6: Konsep Aplikasi Peta Risiko

Dengan kriteria risiko sebagai berikut:

Konsep aplikasi peta risiko pada area pengawasan inspektorat II merupakan bentuk dari pembaharuan (inovasi) agar perencanaan audit intern ke depannya berbasis kepada risiko sehingga menghasilkan

No	URANGAN	URANGAN	NILAI SKOR
1	Anggaran Yang Dikelola	Di bawah 10 Miliar	1
		10-50 Miliar	2
		51-100 Miliar	3
		Di atas 100 Miliar	4
2	Kepegawaian	0-50	1
		51-100	2
		101-200	3
		Di atas 200	4
3	Jumlah TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) BPK	80% atau lebih	1
		11-80%	2
		21%-40%	3
		0-20%	4

Gambar 7: Konsep Daftar Kriteria Risiko

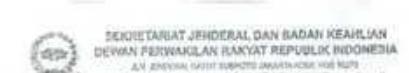
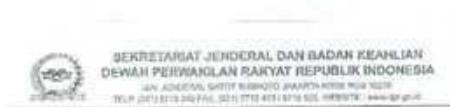
suatu kegiatan audit yang efektif, efisien dan merupakan suatu peningkatan **komitmen mutu** di unit Inspektorat II. Dalam kegiatan rapat internal ini pun **nasionalisme** tercermin pada konsolidasi yang dilakukan secara penuh

nuansa kekeluargaan dan musyawarah mufakat dalam rangka mencapai kesepakatan terkait penyusunan aplikasi peta risiko dan penentuan kriteria-kriteria yang akan diintegrasikan ke dalam aplikasi tersebut, hal tersebut juga mencerminkan nilai **whole of government**. Dalam pelaksanaan rapat pun tata krama, sopan santun, dan komunikasi yang baik diimplementasikan sebagai wujud internalisasi dari nilai **etika publik** di dalamnya.

Manfaat dari penyusunan aplikasi peta risiko adalah untuk memudahkan Inspektorat II dalam mengidentifikasi risiko dari setiap audit yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi landasan bagi Inspektorat II dalam menjalankan audit yang berbasis risiko, serta memudahkan koordinasi antara Inspektorat II dengan audit dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Kegiatan 3: Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan aplikasi peta risiko

Dalam pengumpulan data penunjang, maka yang penulis lakukan pertama kali adalah mengkonsep nota dinas terkait permintaan data ke



Gambar 8: Surat Permintaan Data ke Biro Perencanaan dan Keuangan

Gambar 9: Surat Permintaan Data ke Biro Kepegawaian

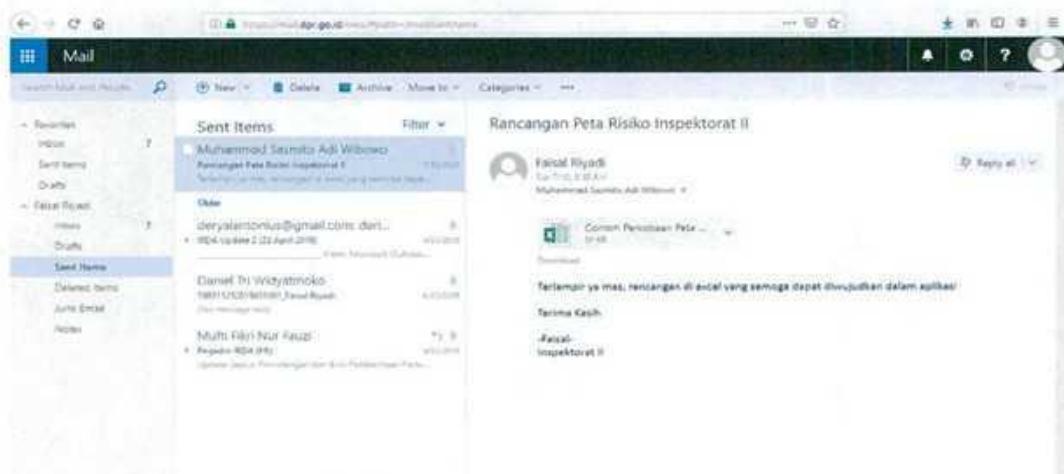
Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Bagian Kepegawaian terkait data anggaran yang dikelola oleh 10 Biro di bawah area pengawasan Inspektorat II periode 2017-2019, Analisis Beban Kinerja (ABK) tahun anggaran 2017-2019, serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK di 10 Biro dari

area pengawasan Inspektorat II. Proses pembuatan dan pengiriman nota dinas permintaan data dilaksanakan pada hari Senin, pada tanggal 29 Juli 2019. Pada tahapan ini penulis melakukan koordinasi dengan unit lain, khususnya Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro Kepegawaian. Komunikasi dijalin dengan rasa sopan santun, dan sesuai dengan prosedur birokrasi yang ada sebagai internalisasi dari nilai **etika publik** di dalamnya.

Manfaat dari pengumpulan data penunjang terkait penyusunan aplikasi peta risiko ini adalah sebagai bahan input pengolahan data di dalam aplikasi tersebut, dimana data-data yang valid tersebut dapat merepresentasikan hasil dari pemetaan risiko dari sudut pandang auditor, agar tercapai kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien, hal tersebut sebagai implementasi dari nilai **komitmen mutu** dan juga **akuntabilitas**.

Kegiatan 4: Membuat Peta Risiko Beserta Aplikasi Pendukungnya

Dalam melaksanakan proses pembuatan peta risiko, penulis berusaha mengintegrasikan antara 3 indikator yang telah disepakati di internal Inspektorat II dengan kriteria yang telah ditentukan ke dalam suatu aplikasi hasil kolaborasi penulis dengan pihak Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI).



Gambar 10: Pengiriman Rancangan Aplikasi Peta Risiko via Email DPR kepada BDTI

Pembuatan aplikasi peta risiko ini dilaksanakan menyesuaikan dengan timeline yang telah ditentukan oleh penulis pada saat rancangan, dimulai pada Minggu ke-5 Juli 2019 – Minggu ke-3 Agustus 2019.

Pada pelaksanaan pembuatan aplikasi, pihak BDTI mengacu kepada rancangan konsep yang telah disharing oleh penulis dan juga melalui proses komunikasi internal.

Di tengah proses penggeraan itu, penulis pun mencoba membuat plan B terkait dengan penyusunan aplikasi peta risiko ini, apabila di tengah jalan proses penggeraan aplikasi tersebut tidak memungkinkan untuk selesai di akhir periode, rencana cadangan dalam penyusunan aplikasi peta risiko tersebut diaplikasikan dengan memanfaatkan microsoft platform, yaitu microsoft excel yang akan diintegrasikan ke dalam cloud DPR Inspektorat II. Setelah dilakukan analisis, ternyata Inspektorat II belum mengaktifkan cloud DPR ke Bidang Data dan Informasi (BDTI). Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, penulis mengkonsep Nota Dinas dan ditandatangani langsung oleh Plt. Inspektur II dalam hal Permintaan Pembuatan Cloud Inspektorat II, kemudia nota dinas tersebut dikirimkan pada hari yang sama ke bidang terkait, yaitu BDTI.



Gambar 11: Surat Permintaan Pembuatan Cloud Irdi

Eka Wardhana, S. Kom., M.T.I., Rekan-rekan BDTI, 15 peserta CPNS Angkatan II Golongan III Tahun 2019 yang mempunyai rencana aktualisasi secara khusus berhubungan dengan pihak BDTI. Pada kesempatan tersebut pihak BDTI memaparkan hasil pekerjaan dari suatu rancangan aktualisasi yang mengacu kepada sistem aplikasi dan elektronik. Aplikasi Peta

Pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019, Biro Kepegawaian cc Bagian Ortala melalui Sdri Santi Girsang mengirimkan file ABK dari tahun 2017-2019. Data langsung dikirim melalui email dpr: faisal.riyadi@dpr.go.id, sesuai dengan alamat pengiriman yang tertera di surat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, penulis dan pihak BDTI melaksanakan Rapat Koordinasi Tahap II dengan Pihak BDTI, Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Bpk. Rusmanto, Bapak Airlangga



Gambar 12: Rapat Koordinasi Tahap II dengan pihak BDTI

Risiko yang terealisasi dibuat menjadi *accessible* dan terintegrasi dengan aplikasi SIRATU (aplikasi proper ITTAMA dalam hal tata kelola surat tugas). Aplikasi peta risiko berada pada subkolom Intern pada aplikasi SIRATU. Berikut halaman interface aplikasi Peta Risiko tersebut disertai dengan kegunaannya:

Gambar 13: Daftar Ukuran Risiko

Sub daftar yang pertama adalah Daftar Ukuran Risiko yang berisi 3 faktor risiko, yaitu anggaran yang dikelola, jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK, dan jumlah Analisis Beban Kinerja (ABK) yang berada pada area pengawasan Inspektorat II, yaitu 10 Biro, unit, dan pusat.

Gambar 14: Daftar Kriteria Risiko

Sub daftar yang kedua adalah Daftar Kriteria Risiko yang berisi penjelasan kriteria-kriteria dari faktor risiko yang telah ditentukan sebelumnya. Daftar Kriteria Risiko ini merupakan landasan yang penting dalam penentuan bobot dari 3 kriteria pada 10 biro/unit/pusat. Kemudian pada sub daftar ketiga yaitu Daftar Peta Risiko yang berisi penjelasan faktor risiko yang ada pada setiap biro/unit/pusat.

No.	Tahun	Unit Kerja	Kriteria	Jumlah	Total	Bobot	Akhir
1.	2019	BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	R1 R2 R3 R4 R5 R6	3	23.822.481.000	2	EDIT DELETE
2.	2019	BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	R1 R2 R3 R4 R5 R6	3	23.822.481.000	2	EDIT DELETE
3.	2019	BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	R1 R2 R3 R4 R5 R6	3	23.822.481.000	2	EDIT DELETE

Gambar 15: Daftar Peta Risiko

Selanjutnya dari Daftar Peta Risiko tersebut akan diolah kedalam satu sheet khusus yang menggabungkan bobot penilaian dari setiap Biro/Unit/Pusat ke dalam suatu pemeringkatan berdasarkan total bobot yang paling tinggi yang berarti menjadi prioritas kegiatan pengawasan untuk dimasukan ke dalam Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) di tahun yang akan datang. Hal tersebut dapat dilihat pada sub daftar yang keempat, yaitu Laporan Peta Risiko.

No.	KODE UNIT	UNIT / BIRO	TOTAL	URAIAN	BOBOT	JUMLAH	URAIAN	BOBOT
1.	5783	BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN	121.574.356.000	Diketahui 100% Miliar	4	100	80% diketahui sejauh	

Gambar 16: Laporan Peta Risiko Per Tahun 1

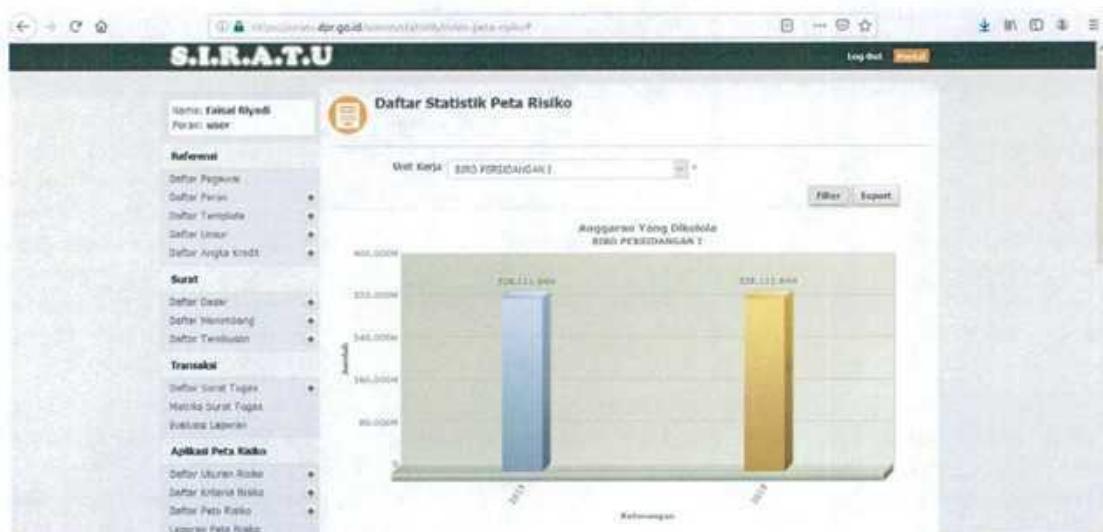
AH	URAIAN	BOBOT	JUMLAH PEMANGKU	KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH	URAIAN	BOBOT	URUTAN RISIKO
0	80% atau lebih	1	59	330	271	Di atas 200	4	9

Gambar 17: Laporan Peta Risiko Per Tahun 2

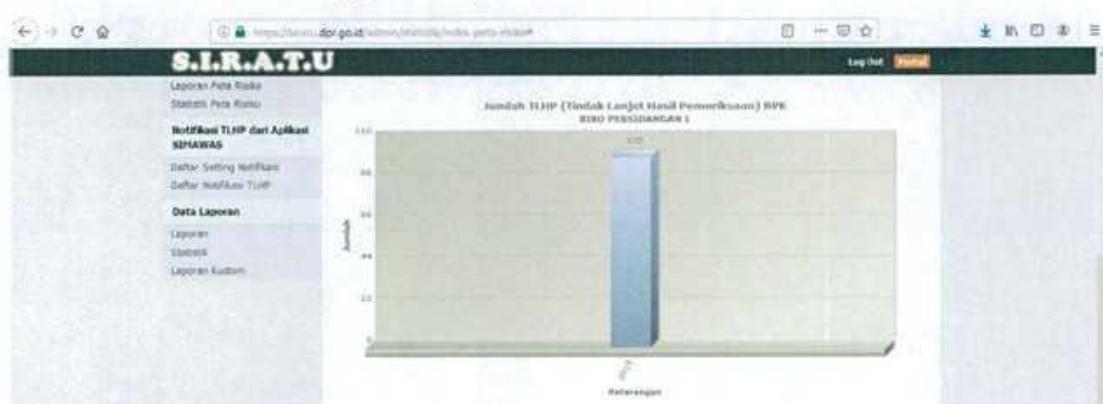
No.	Nama Satker	Kriteria	2017	2018	2019
1	BIRO PEMBERITAMAAN PARLEMEN	Anggaran Yang Dikelola	0	0	121.574.336.000
2	BIRO PEMBERITAMAAN PARLEMEN	Jumlah TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) BPK	0	0	100
3	BIRO PEMBERITAMAAN PARLEMEN	Kepegawaian	0	0	271

Gambar 18: Laporan Peta Risiko Per Satker

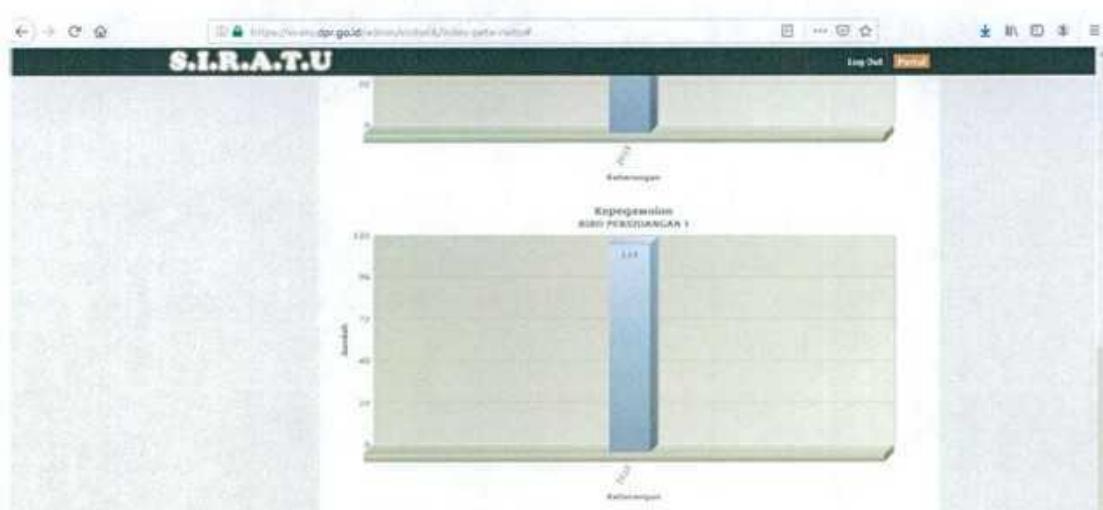
Semua rangkaian tersebut akan dapat dilihat melalui grafik yang dapat kita lihat pada sub daftar yang kelima, yaitu Statistik Peta Risiko.



Gambar 19: Statistik Per Anggaran Yang Dikelola



Gambar 20: Statistik Per Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK



Gambar 21: Statistik Berdasarkan Kepengawian

Dalam rangkaian proses pembuatan aplikasi ini, penulis melaksanakan komunikasi yang efektif, dan efisien sesuai dengan nilai- nilai **komitmen mutu** serta menerapkan proses berpikir yang inovatif dan kreatif demi menunjang proses kegiatan pengawasan yang semakin baik kedepannya bagi unit Inspektorat II. Di samping itu prinsip **akuntabilitas** dalam pemaparan data risiko yang ada di setiap area pengawasan Inspektorat II, menghasilkan harmonisasi peringatan pencegahan bagi unit yang akan diawasi.

Kegiatan 5: Melakukan uji coba dan evaluasi peta risiko

Uji coba dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 bertempat di ruang kerja Inspektorat II kepada para auditor yang berada di unit Inspektorat II.

Pembuatan form evaluasi dilaksanakan pada hari yang sama dan langsung disebar kepada para auditor sebagai *recipient*.



Gambar 22: Uji Coba Aplikasi Peta Risiko dan Penyebaran Form Evaluasi

Kemudian pada hari Jumat pada tanggal 23 Agustus 2019 dilaksanakan evaluasi terhadap hasil tersebut, sebagai bahan masukan terhadap finalisasi aplikasi peta risiko pada area pengawasan Inspektorat II.



Gambar 23: Analisa Form Evaluasi

Dalam tahapan ini penulis melaksanakan koordinasi dengan sesama auditor sebagai pengguna aplikasi ke depannya. Penulis melaksanakan komunikasi yang baik dan menerima masukan yang positif demi terwujudnya **akuntabilitas** peta risiko serta

komitmen mutu dalam hal identifikasi risiko terhadap biro/unit/pusat yang berada di bawah area pengawasan Inspektorat II.

Kegiatan 6: Melaporkan Hasil Akhir Kegiatan

Pada tahap akhir ini, penulis memaparkan hasil dari rancangan aktualisasi yang berusaha direalisasikan pada masa habituasi selama jangka waktu 30 hari di depan para auditor Inspektorat II. Output akhir yang didapat setelah melalui 5 step kegiatan di awal dipertanggung jawabkan di dalam kegiatan akhir ini. Sosialisasi dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 di Ruang Rapat Inspektorat II Gedung Setjen dan BK DPR RI Lantai 5.



Gambar 24: Sosialisasi Aplikasi Peta Risiko di Lingkungan Inspektorat II

Pada sosialisasi akhir ini, penulis menjelaskan pentingnya aplikasi ini sebagai awalan dalam penentuan nilai *auditable units* pada area pengawasan Inspektorat II, tata kelola risiko yang rapi serta terstruktur akan semakin menunjang kinerja kegiatan pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi utama dari Inspektorat II. Penulis mengimplementasikan komunikasi yang baik demi terwujudnya output yang efektif dan efisien yang terintegrasi dengan nilai **akuntabilitas** dan **komitmen mutu** demi terwujudnya lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang terbebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang terintegrasi dengan nilai **anti korupsi**.

B. STAKEHOLDER

No	Stakeholder	Peran
1.	Para Pejabat dan Auditor di Lingkungan Inspektorat II	Pelengkap Informasi
2	TU ITTAMA	Pendukung Data
3	Biro Kepegawaian	Pendukung Administrasi
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	Supporting Data Tentang ABK
5	BDTI	Supporting Data Tentang Anggaran
		Supporting IT

C. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN

Tabel 5. Analisis Dampak Internal dan Eksternal Jika Kegiatan Tidak Dilakukan

Internal	Eksternal
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlaksananya sistem audit berbasis risiko • Tidak tersusunnya program kerja pengawasan tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi celah kepada oknum dalam melakukan praktik-praktik menyimpang yang dapat berindikasi terhadap temuan BPK • Kinerja Instansi/Lembaga dapat berpotensi Menurun

Inspektorat II yang berbasis risiko

- *Dapat bergesernya Opini BPK dari "Wajar Tanpa Pengecualian" menjadi "Wajar Dengan Pengecualian"*

D. TIME SCHEDULE

Tabel 6. Timeline Rencana Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan	Juli 2019		Agustus 2019				
	Week	Week					
			4	5	1	2	3
Rapat dengan jajaran Internal Inspektorat II							
Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)							
Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan aplikasi peta risiko							
Membuat peta risiko beserta aplikasi pendukungnya							
Melakukan uji coba dan Evaluasi Peta Risiko beserta aplikasi pendukungnya							
Melaporkan hasil akhir kegiatan							

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penulis telah melaksanakan kegiatan aktualisasi pada masa habituasi selama 30 hari di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dalam pelaksanaan tersebut telah diimplementasikan nilai aneka di dalamnya.
2. Inspektorat II selaku unit terkait sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh penulis, karena dapat mempermudah dan menunjang kinerja auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang berbasis risiko.
3. Ide awal penulis telah berkembang hingga menjadi aplikasi, hal itu atas dasar pemenuhan saran dan masukan dari *coach* dan *penguji*, walaupun dalam pelaksanaannya dibutuhkan banyak tahapan, tetapi penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya.

B. SARAN

Hasil proses perencanaan audit intern tahunan adalah daftar *auditabile units* terpilih, disusun dalam berdasarkan urutan signifikansi atau prioritasnya yang memerlukan asurans dan penyempurnaan atas sistem manajemennya. Dengan menetapkan urutan klien berdasarkan prioritasnya, penugasan diharapkan akan menghasilkan usulan perbaikan yang memberi nilai tambah yang optimal dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi organisasi. Dengan demikian, aktivitas audit akan lebih tepat sasaran, berdasarkan risiko dan mampu memberikan keyakinan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan klien akan dapat tercapai.

LAMPIRAN KEGIATAN

A. LAMPIRAN 1

Foto "Presentasi singkat rancangan rencana kegiatan di hadapan Bpk. Inspektur Utama pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019":



B. LAMPIRAN 2

Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan dan Sudah di TTD oleh Bapak Inspektur Utama pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019:



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN NOMOR: IP/196/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Plt. Inspektur II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Faisal Riyadi, S.E.
NIP : 198911232019031001
Jabatan : Auditor Ahli Pertama
Unit Kerja : Inspektorat II
Mentor : Enden Adipati Koma, S.E, M.A.P.

Adalah benar CPNS Golongan III Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang melaksanakan kegiatan aktualisasi mulai tanggal 22 Juli – 30 Agustus 2019. Adapun kegiatan aktualisasi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Auditor Madya

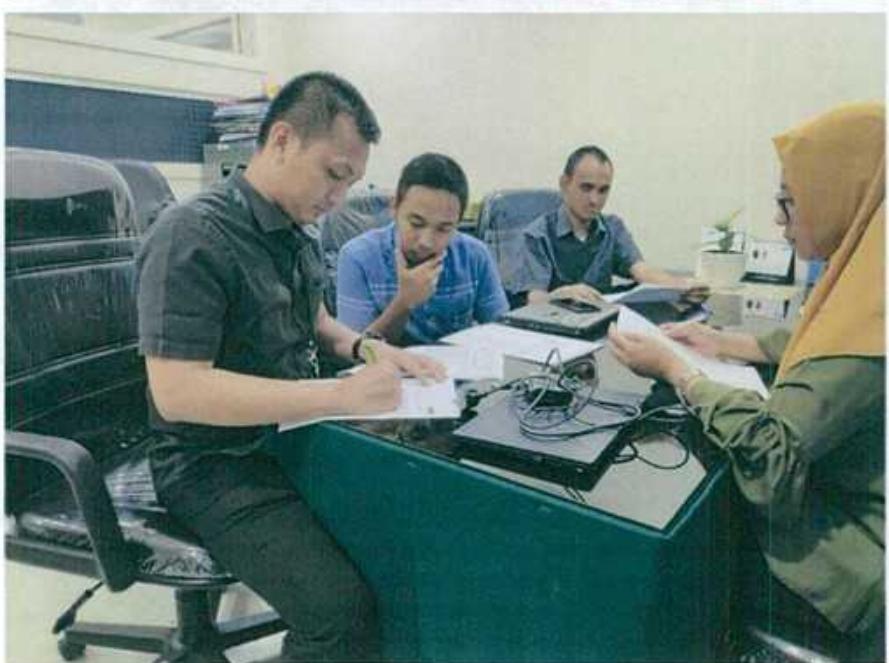
Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P.
NIP. 196907151999031004

Jakarta, 22 Juli 2019
Plt. Inspektur II

Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 196207191988031001

C. LAMPIRAN 3

Foto Kegiatan:



Kartu Kendali:

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia						PESERTA
KARTU KENDALI PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN 2 TAHUN 2019						
Nama : Faisal Riyadi Instansi : Setjen dan BK DPR RI NIP. : 19891123 201903 1 001			Nama Coach : Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si			
No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach*	
1	25/07/2019	Koordinasi Raport	Tatac Maka	Menulis raport	Re	
2						
3	05/08/2019	Pengolahan Data	Tatac Maka	Menulis perbaik data	Re	
4						
5	27/08/2019	Didiksi Software	Tatac Maka	upgrade informasi tabel	Re	
6	30/08/2019	Koordinasi laporan	Tatac Maka	update tabel raport akhirnya	Re	
7						
8						
9						
10						
11						
12	Dst..					

(*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

Rusmanto, SH., MH

D. LAMPIRAN 4

Foto Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019:



Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II
pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019:



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : IP/198/VII/2019

24 Juli 2019

Sifat : Biasa

Derajat: Segera

Perihal : Undangan

Yth.

1. Inspektur I
2. Kepala Bagian TU Inspektorat Utama
3. Para Kasubag TU Inspektorat Utama
4. Auditor Inspektorat II
5. JFU Inspektorat Utama

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Jakarta

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada pertemuan
yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 25 Juli 2019

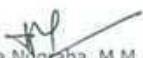
Pukul : 10.00 WIB

Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II

Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur II


Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 196207191988031001

Absensi Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019:

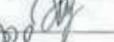
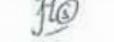


SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Kamis, 25 Juli 2019
Waktu : PKL. 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II
Acara : Rapat Koordinasi
Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. SETYANTA NUORAH, M.M.	INSPEKTUR UTAMA	
2.	Dr. DEWI BARLIANA S., M.Psi, QIA.	INSPEKTUR I	
3.	HANAFIAH, S.Sos.	KABAG TU ITTAMA	
4.	ULFA NURFAJAR, S.E., M.A.B.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	
5.	AFNIWATY TANJUNG, S.E., M.E.	KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN	
6.	TIMBANG SUPRIYANTO, S.Sos.	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
7.	ENDEN ADIPATI KOMA, S.E., M.A.P.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
8.	DENI WIBISONO, S. Hut., M. Si., CFA	AUDITOR INSPEKTORAT II	
9.	HASNELSON, SH.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
10.	NURHARIYANI S.E., M.M.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
11.	DENNY RAMADON, S.E.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
12.	TARIYONO, S.A.P.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
13.	MARGARETHA SUSANTI, S.E.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
14.	FAISAL RYADI, S.E.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
15.	FITRIYANI LESTARI, S.E.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
16.	MUFTI FIKRI NUR FAUZI, A. Msi.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
17.	PUTRI WIDYASARI NOVIYANTO, A. Msi.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
18.	RETI ARDIYANTI, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
19.	SRI NASTITI TRI NURASHI, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
20.	HARYANTI	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	

21.	ANIA MUTIA'AFFIF	PENGADMINISTRASI UMUM	
22.	INDAH TUSILA WATI	PENGADMINISTRASI UMUM	
23.	SRI REJEKI, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
24.	MUHAMAD ALI, S.Sos.	PENGELOLA DATA	
25.	SURETIANTO, S.Kom.	PENGELOLA DATA	
26.	ANTONIUS DERYAL G., S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
27.	ALISA FATIMAH, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
28.	DYATRI MICKY ANGORITA, S.I.P	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
29.	MUHAMMAD ILHAM ANTARIKSA, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
30.	ZELKA SEVRINA, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
31.	ZAHRA WANISA, S. IAN.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
32.	ARIZAL MASHUDI, A.Md	PENGELOLA DATA	
33.	MIKHAIL MUHAMAD JIBRIL, A.Md., Ak.	PENGELOLA DATA	
34.	REZA PRISCHA NANDA, A.Md	PENGELOLA DATA	
35.	FIROSA SIRESIA, S.E.	PENGELOLA DATA	
36.	Sebnat dan Sartini	—	

Laporan Singkat Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko
Inspektorat II pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019:



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT
KOORDINASI PENYUSUNAN PETA RISIKO INSPEKTORAT II
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Hari/tanggal : Kamis, 25 Juli 2019
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II, Gedung Setjen dan BK DPR RI, Lantai 5
Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II
Ketua Rapat : Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
Koordinator : Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P (Auditor Ahli Madya Inspektorat II)
Penyaji : Faisal Riyadi (Auditor Ahli Pertama Inspektorat II)
Hadir : 1. Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat II
2. Rekan-Rekan Tata Usaha Inspektorat II
3. Rekan-Rekan CPNS

PENDAHULUAN

1. Rapat dimulai Pada Hari Senin, 25 Juli 2019 pukul 10.00 WIB dibuka oleh Pt. Inspektur II Bapak Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
2. Dilanjutkan oleh Bapak Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P. Selaku Koordinator Rapat.
 - a. Koordinator membuka rapat dengan menyampaikan pengantar:
 - 1) Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan aktualisasi pelatihan dasar, sdr. Faisal Riyadi.
 - 2) Bawa sdr. Faisal Riyadi selaku Auditor Ahli Pertama telah melaksanakan pelatihan dasar selama 3 minggu di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI.

- 3) Upload aplikasi ke DPR Cloud Inspektorat II.
3. Kesimpulan Hasil Rapat Pembahasan Percepatan Penyusunan Aplikasi Peta Risiko di Area Pengawasan Inspektorat II yaitu :
 - a) Jajaran Inspektorat II sudah mengetahui mengenai rancangan aktualisasi yang sedang disusun oleh Sdr. Faisal Riyadi.
 - b) Rencana kegiatan yang sudah disusun disesuaikan dengan jangka waktu habituasi yang hanya berlangsung selama 30 hari.
 - c) Surat Permohonan permintaan data agar dipersiapkan dari sekarang untuk segera dikirim pada minggu ke-5 Bulan Juli 2019.
 - d) Pembuatan surat permohonan pembuatan DPR Cloud Inspektorat II dari Plt. Inspektur II kepada Kepala BDTI.
 - e) Diharapkan DPR Cloud Inspektorat II dapat terealisasi pada minggu ke-1 Bulan Agustus 2019, agar nantinya dapat dikoneksikan dengan rancangan aplikasi peta risiko.
 - f) Perkuat koordinasi dengan mentor dan coach, agar laporan aktualisasi kegiatan dapat terealisasi beserta hasilnya.
3. Rapat ditutup pada Pukul 12.05 WIB.

Jakarta, 25 Juli 2019
Plt. Inspektur II,



Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP.196207191988031001

E. LAMPIRAN 5

Foto Rapat Koordinasi dengan BDTI terkait Rancangan Aktualisasi CPNS Angkatan II pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019:



Absensi Rapat Koordinasi dengan BDTI terkait Rancangan Aktualisasi CPNS Angkatan II:



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 345 FAX. (021) 5715 421 / 5715 926 LAMAN : www.dpr.go.id

**Daftar Hadir Peserta
Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal dan Badan Kehilangan DPR RI**

Hari, tanggal : Selasa, 23 Juli 2019
Waktu : Pukul 08.30 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pusdiklat

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Esther Putri Lesmada Penjatuhan	Pusat Perancangan Undang-Undang	1.
2.	Hesekiel Marudul Morsa	Inspektorat I	2.
3.	Dandy Adrian Azkara	Pusat Penelitian	3.
4.	Tasya Armani Putri	Tu Pusat PUU	4.
5.	Yudi Pravita	BKSAP	5.
6.	Natali Anasiya	Bagian Kepegawaian	6.
7.	Ridha Khonunnisa	Bagian Pengaduan Masyarakat	7.
8.	Muhammad Iranda	Bagian Sekretariat Komisi III	8.
9.	Rufaini Hasna Ghassani	Pusat Perancangan Pelaksanaan UU	9.
10.	Ar sis Rammasai	Pusat Perancangan Pelaksanaan UU	10.
11.	Burhanudin M. Latifahman	Pusat Penelitian	11.
12.	Destya Andini	Sekretariat Komisi V	12.

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
13.	Faisal Riyadi	Inspektorat II	
14.	Yusuf Satrio Pambudi	Unit Layanan Pengaduan	
15.	Rhema Ardiansyah	Bidang Pelaksanaan Diklat	

Laporan Singkat Rapat Koordinasi dengan BDTI terkait Rancangan Aktualisasi CPNS Angkatan II:

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBUATAN APLIKASI BERSAMA BDTI

Tahun sidang	:	2018 – 2019
Jenis Rapat	:	Rapat Koordinasi
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Selasa, 27 Juli 2019
Pukul	:	08.30 – 10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Pusdiklat Gedung Sekretariat Jenderal Jantai 4
Acara	:	Pembahasan Pembuatan Aplikasi Bagi Projek Aktualisasi CPNS
Ketua Rapat	:	Henry Widyaningsih, S.Psi., M.Si
Hadir	:	<u>BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI</u>

1. Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I.
2. Muhammad Sasmito Adi Wibowo, A.Md.
3. Daniel Tri Widiatmoko, A.Md

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H.
2. Tasya Armani Putri, S.I.A
3. Ridha Khoirunnisa, S.I.P.
4. Dandy Adrian Azkara, S. E.
5. Yudi Prawira
6. Faisal Riyadi, S.E.
7. Refaini Hasna Ghassani, S. H.
8. Anisa Rahmasari, S. H.
9. Hesekiel Marudut Morsa, S.E.
10. Yusuf Satrio Pambudi, S.E.
11. Rhessi Ardiansyah, S.Pd
12. Muhammad Iranda, S.M.
13. Destya Andini, S.E.

I. PEMBUKAAN

1. Kepala Evaluasi Diklat, Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si, selaku Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 08.30 WIB.

II. PEMBAHASAN

1. Rapat dilaksanakan dalam rangka pembuatan aplikasi untuk proyek aktualisasi CPNS 2019.
2. Masing-masing peserta mengutarakan kepentingannya kepada BDTI dan kemudian dilakukan pendataan sesuai kebutuhan masing-masing untuk ditidak lanjuti.

III. KESIMPULAN

1. BDTI menyatakan dukungan dan siap membantu pembuatan aplikasi untuk proyek aktualisasi CPNS 2019.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat.

KETUA RAPAT,



Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si
NIP. 197212031998032003

F. LAMPIRAN 6

Mengirim rancangan aplikasi peta risiko via email DPR RI kepada BDTI cc. Sasmito:

The screenshot shows an Outlook inbox with the following details:

- Search Mail and People:** Search bar.
- Mail:** Main tab selected.
- Navigation pane:** Favorites, Inbox (7), Sent Items, Drafts, Faisal Riyadi (Inbox 7, Drafts), Sent Items (selected), Deleted Items, Junk Email, Notes.
- Sent Items:** List of sent emails:
 - 1. Muhammad Sasmito Adi Wibowo: Rancangan Peta Risiko Inspektorat II (Sent 2020-04-20, 8:30 AM)
 - 2. deryalantonius@gmail.com: dery... (Sent 2019-04-23, 8:30 AM)
 - 3. Mufti Fikri Nur Fauzi: Fejedin RDA (FR) (Sent 2019-04-20, 8:30 AM)
- Message Preview:** An email from Faisal Riyadi dated 2020-04-20 at 8:30 AM. The subject is "Rancangan Peta Risiko Inspektorat II". The message body contains:

Terlampir ya mas, rancangan di excel yang semoga dapat diwujudkan dalam aplikasi

Terima Kasih

-Faisal-
Inspektorat II

The attachment is a Microsoft Excel file named "Contoh Percobaan Peta - 2019.xlsx".
- Download:** Download link for the attached Excel file.

Rancangan aplikasi peta risiko:

DATA PROYEK AKTUALISASI

Nama : Faisal Riyadi
NIP : 198911232019031001
Jabatan : Auditor Ahli Pertama
Unit Kerja : Inspektorat II
Judul Aktualisasi : "Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II"
Nama Proyek Aktualisasi : Aplikasi Peta Risiko Area Pengawasan Inspektorat II
Input : Aplikasi Peta Risiko Area Pengawasan Inspektorat II

- Tabel Peta Risiko
 - Nomor
 - Kode Unit
 - Unit/Biro
 - Anggaran 2019
 - MAK 51
 - MAK 52
 - Setjen
 - Dewan
 - MAK 53
 - Total
 - Bobot
 - TLHP BPK
 - Jumlah
 - Bobot
 - SDM
 - Jumlah Pemangku
 - Kebutuhan Pegawai
 - Selisih
 - Bobot
 - Urutan Risiko
- Tabel Kriteria Risiko
 - Nomor
 - Ukuran
 - Uraian
 - Nilai Skor)

Proses : Aplikasi Intranet Dengan Menggunakan *username* &

password yang dapat digunakan oleh para auditor
di Inspektorat II

- Edit
- Hapus
- Perhitungan sama seperti excel (tambah, kurang, kali, bagi, IF)

Output : Aplikasi Peta Risiko pada Area Pengawasan
Inspektorat II yang berbasis intranet dengan
menggunakan *username & password*

Contoh Tampilan

PETA RISIKO										
NO	KODE RISIKO	JENIS RISIKO	ANGKAAN JESTI					JUMLAH	KONTAKAN	SIMPAN
			MIN 50	MAX 50	MEAN	MAX 50	Total			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

G. LAMPIRAN 7

Nota Dinas Permintaan Data Anggaran yang dikelola oleh 10 Biro di bawah pengawasan Inspektorat II ke Biro Perencanaan dan Keuangan:



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**NOTA DINAS
NO.JP/199/VII/2019**

Kepada : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari : Pt. Inspektor II
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen
Tanggal : 29 Juli 2019

Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan aplikasi peta risiko di area pengawasan Inspektorat II, maka kami membutuhkan beberapa dokumen pendukung yang kami minta dari Bagian Perencanaan, sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2019 pada Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian beserta jajaran di bawahnya.
2. Pagu indikatif Tahun 2020 pada Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian beserta jajaran di bawahnya.

Penyerahan dokumen dapat berupa softcopy yang dapat dikirimkan ke alamat email faisal.riyadi@dpr.go.id.

Demikian permintaan kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,
Pt. Inspektor II


Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 19620719 198803 1 001

Tembusan:
1. Pt. Deputi Bidang Administrasi
2. Deputi Bidang Persidangan
3. Pt. Kepala Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

H. LAMPIRAN 8:

Nota Dinas Permintaan Data Analisis Beban Kinerja (ABK) mengenai 10 Biro di bawah pengawasan Inspektorat II ke Biro Kepegawaian dan Organisasi:



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS
NO. IP/200/VII/2019

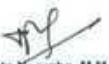
Kepada : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Dari : Plt. Inspektur II
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen
Tanggal : 29 Juli 2019

Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan aplikasi peta risiko di area pengawasan Inspektorat II, maka kami membutuhkan dokumen pendukung yaitu Laporan Analisis Beban Kinerja (ABK) Tahun 2017-2019 yang kami minta dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Penyerahan dokumen dapat berupa softcopy yang dapat dikirimkan ke alamat email faisal.riyadi@dpr.go.id.

Demikian permintaan kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,
Plt. Inspektur II


Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 19620719 198803 1 001

Tembusan:
Plt. Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

I. LAMPIRAN 9

Nota Dinas Permintaan Pembuatan Cloud Inspektorat II:



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

NO. IP/206/VII/2019

Kepada Yth : Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
Dari : Plt. Inspektor II
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Pembuatan Cloud
Tanggal : 31 Juli 2019

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Inspektorat II membutuhkan akun Cloud yang dapat di akses oleh seluruh pegawai yang ada di unit kerja Inspektorat II.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya saudara dapat menugaskan tenaga teknis untuk membantu pembuatan akun cloud dimaksud.

Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,
Plt. Inspektor II


Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 196203191988031001

J. LAMPIRAN 10

Screenshot Email Pengiriman Data ABK 2017-2018:

The screenshot shows an email inbox from the website <https://mail.dpr.go.id>. The inbox is titled "ABK 2017, 2018". The message from "Santy Yulfiani Girsang" is highlighted. The message subject is "ABK 2017, 2018" and it was sent on "Mon 6/2/2019". The message body contains a link to "3_LAMPIRAN SK ABK JU...". The message has three attachments: "3_ISI ABK.pdf" (1 MB) and "4_ISI ABK.pdf" (259 KB). The message was sent to "Faisal Riyadi". The inbox also shows other messages from "Niyanti Anggitasari" and "Mikhail Muhamad Jibril".

Data ABK 2017

- 5 -

Pada tahun 2017 ini, Setjen dan BK DPR RI kembali melakukan penghitungan beban kerja. Hal ini dilaksanakan mengingat pada tahun ini, Setjen dan BK DPR RI telah melaksanakan penataan jabatan khususnya nomenklatur jabatan pelaksana yang mendasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selain itu Setjen dan BK DPR RI juga telah melaksanakan penghitungan kembali beban kerja beberapa jabatan fungsional diantaranya Peneliti, Apoteker, dan Nutrisionis. Hasil pengukuran beban kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017 sebagaimana tampak pada Tabel 1.

Tabel 1
Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEMANGKU	KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH	
				+	-
1. Sekretaris Jenderal	1	1	0	0	0
2. Deputi Bidang Administrasi	1	1	0	0	0
3. Kepala Biro Protokol	28	75	0	47	
4. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	24	45	1	22	
5. Kepala Biro Kepegawai dan Organisasi	119	177	8	66	
6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	80	107	2	29	
7. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	154	313	14	173	
8. Kepala Biro Umum	188	907	11	730	
9. Deputi Bidang Persidangan	1	1	0	0	0
10. Kepala Biro Persidangan I	114	127	4	17	
11. Kepala Biro Persidangan II	46	56	2	12	
12. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen	40	55	6	21	
13. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	105	135	9	39	
14. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen	48	326	2	280	
15. Inspektor Utama	1	1	0	0	0
16. Inspektur I	12	30	1	19	
17. Inspektur II	7	30	0	23	
18. Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama	12	31	0	19	
19. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	21	45	0	24	
20. Kepala Pusat Data dan Informasi	94	121	5	32	
21. Kepala Badan Keahlian	1	1	0	0	0
22. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang	55	80	5	30	

Data ABK 2018:

ditindaklanjuti dengan kegiatan analisis jabatan. Selanjutnya jabatan yang telah disusun analisis jabatannya dilakukan penghitungan beban kerja masing-masing jabatan.

Berdasarkan data jumlah pemangku jabatan dari Bagian Kepegawaian per bulan Juni 2018, hasil pengukuran beban kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 sebagaimana tampak pada Tabel 1.

Tabel 1
Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

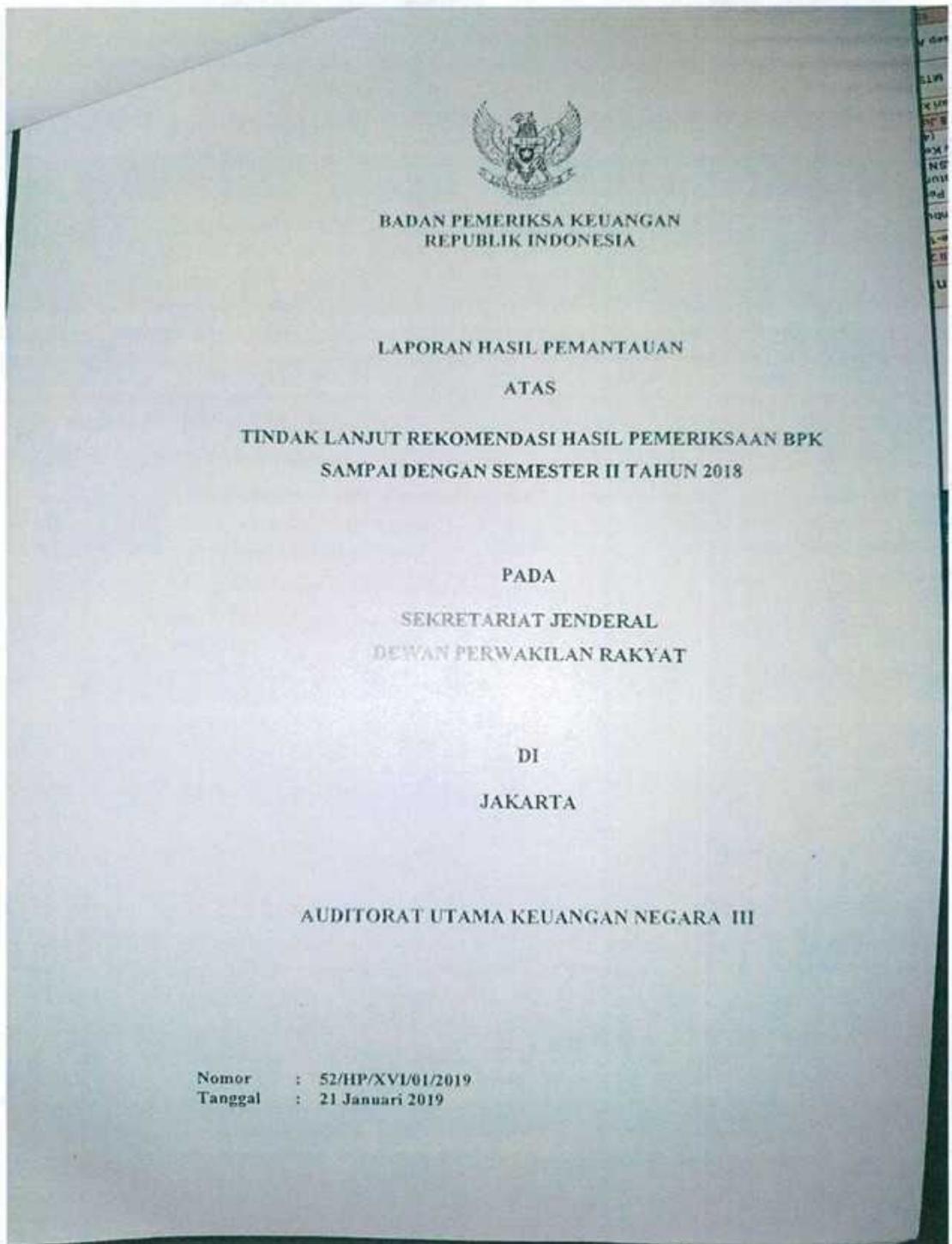
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEMANGKU	KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH	
				+	-
1.	Sekretaris Jenderal	1	1	0	0
2.	Deputi Bidang Administrasi	1	1	0	0
3.	Kepala Biro Protokol	27	75	0	48
4.	Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	33	47	4	18
5.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	117	192	4	79
6.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	77	107	1	31
7.	Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	150	314	11	175
8.	Kepala Biro Umum	174	1101	6	933
9.	Deputi Bidang Persidangan	1	1	0	0
10.	Kepala Biro Persidangan I	130	271	23	164
11.	Kepala Biro Persidangan II	46	66	0	20
12.	Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen	41	52	1	12
13.	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	111	144	9	42
14.	Kepala Biro Pemberitaan Parlemen	59	330	3	274
15.	Inspektur Utama	1	1	0	0
16.	Inspektur I	12	28	0	16
17.	Inspektur II	8	14	0	6
18.	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama	12	31	0	19
19.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	23	47	0	24

K. LAMPIRAN 11

Foto Kegiatan TLHP BPK:



Data TLHP BPK:



L. LAMPIRAN 12

Screenshot Data Pagu Anggaran 10 Biro/Unit/Pusat di Bawah Area Pengawasan Inspektorat II:
Anggaran 2018

S-1000102
Sistem Dukungan Monitoring Anggaran dan Hasil (SDMAH)

- Denny Ramadhan (waditz_kunci)
- Log Out
- Profil

Nama: Denny Ramadhan
Peran: Kepala Seksi

Data Laporan

- Laporan

Daftar Laporan

Jenis Laporan : DATA REALISASI ANGGARAN (BERJALAN)

Tanggal : 31/12/2018 v.2.51-12-2018

Kode Sektor : Seluruh Data (0) *

Anak Sektor : Pusat Penelitian (15)

Pengaturan

Pengaturan

Excel

DATA REALISASI ANGGARAN (BERJALAN)
TAHUN ANGGARAN

Page	Anal. Sektor	Pengaturan	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		183.000.000	127.200.000	55.800.000
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		179.500.000	129.775.000	125.000
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		990.900.000	578.800.000	214.200.000
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		119.710.000	106.129.525	580.475
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		982.900.000	645.100.000	337.800.000
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		1.387.432.000	1.368.209.076	19.245.924
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		19.750.000	12.586.770	77.163.230
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		126.960.000	126.707.600	257.000
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		761.600.000	671.000.000	90.600.000
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		2.752.640.000	2.596.545.900	46.094.100
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		30.900.000	14.400.000	11.490.000
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		50.000.000	10.574.300	19.425.700
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		53.820.000	51.150.000	2.670.000
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		154.500.000	127.330.000	27.150.000
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		9.720.000	9.437.500	2.512.500
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		228.300.000	208.500.000	18.900.000
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		670.962.000	639.267.200	30.794.700
15	11.500.001.001.001.052.G.521111		11.700.000	11.700.000	0
	JUMLAH		15,162,558.000	13,255,218.310	1,907,339.690

Hak Cipta © 2015
Bulang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) - Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) - Sekretariat Jenderal DPR RI

<http://sistemmonitoringanggaran.sj.dpr.go.id>

Anggaran 2019:

Kode	Uraian	Jumlah
59	BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN	105.179.724.000
67	BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	83.366.242.000
126	BIRO PERSIDANGAN I	464.515.841.000
127	BIRO PERSIDANGAN II	138.383.453.000
139	PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG	7.933.929.000
150	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	2.811.234.802.000
152	BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	84.562.500.000
	Total	3,695,176,491,000

Hak Cipta © 2011

Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) - Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) - Sekretariat
Jenderal DPR RI

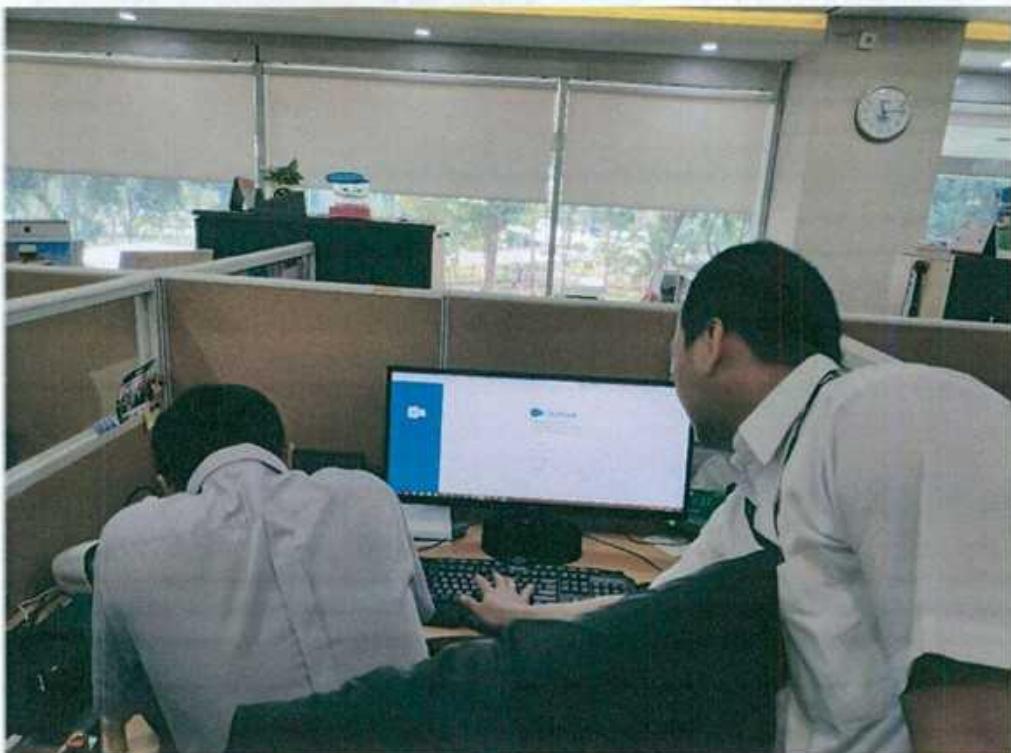
**JUMLAH PER BIRO - DIPA
TAHUN ANGGARAN 2019
KEGIATAN**

Tanggal Cetak: 15-08-2019

KODE	URAIAN	JUMLAH
59	BIRO KESKRETARIATAN PIMPINAN	9.098.537.000
67	BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	4.664.629.000
83	BIRO UMUM	227.245.575.000
123	INSPEKTORAT I	3.511.967.000
124	INSPEKTORAT II	3.960.541.000
126	BIRO PERSIDANGAN I	7.567.782.000
127	BIRO PERSIDANGAN II	2.442.981.000
128	BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN	165.952.882.000
129	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	23.529.681.000
133	PUSAT DATA DAN INFORMASI	29.812.523.000
138	PUSAT PERANCANGAN UNGANG-UNGANG	17.802.702.000
139	PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDA	4.852.067.000
140	PUSAT KAJIAN ANGGARAN	5.258.830.000
141	PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	3.033.333.000
143	BIRO PROTOKOL	19.798.959.000
146	BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAK	3.422.203.000
147	BIRO KEPERGAWAIAN DAN ORGANISASI	38.238.775.000
150	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	250.626.184.000
152	BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGAR	1.188.237.248.000
163	PUSAT PENELITIAN	14.655.277.000

M. LAMPIRAN 13

Foto Pembuatan Cloud Inspektorat II:



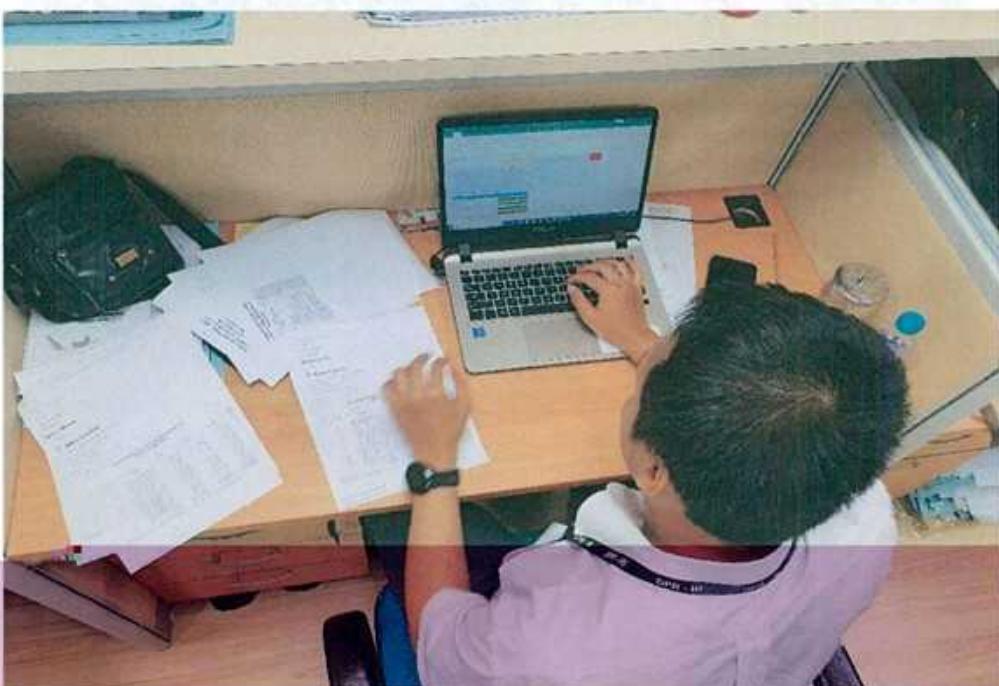
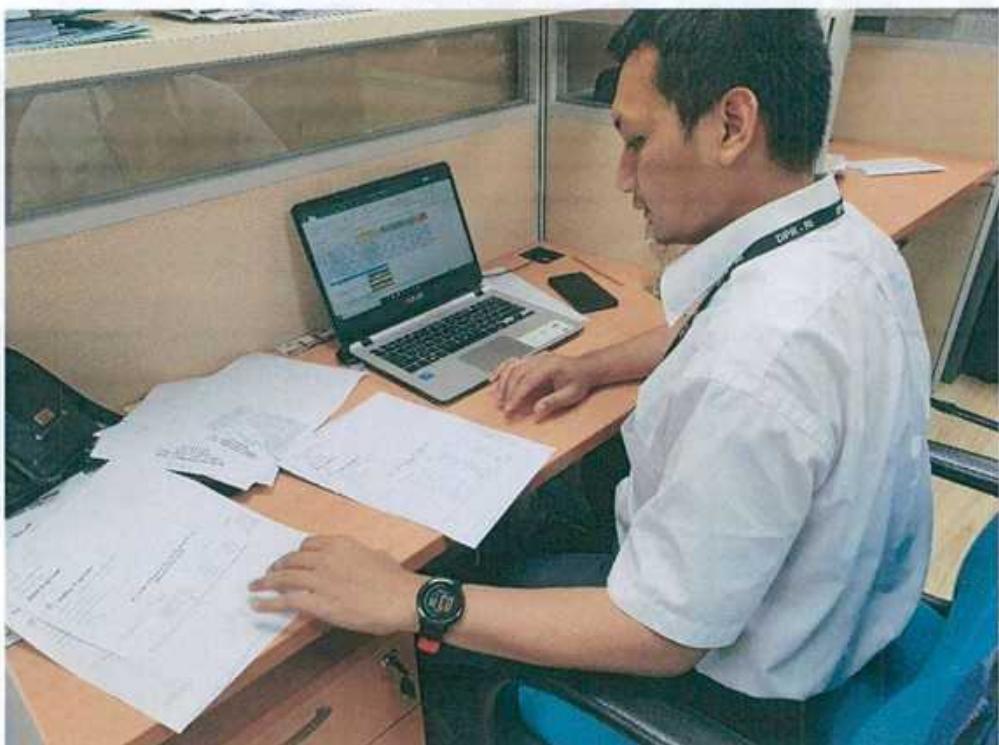
N. LAMPIRAN 14

Foto Rapat Pemaparan Hasil Pekerjaan Aktualisasi oleh BDTI:



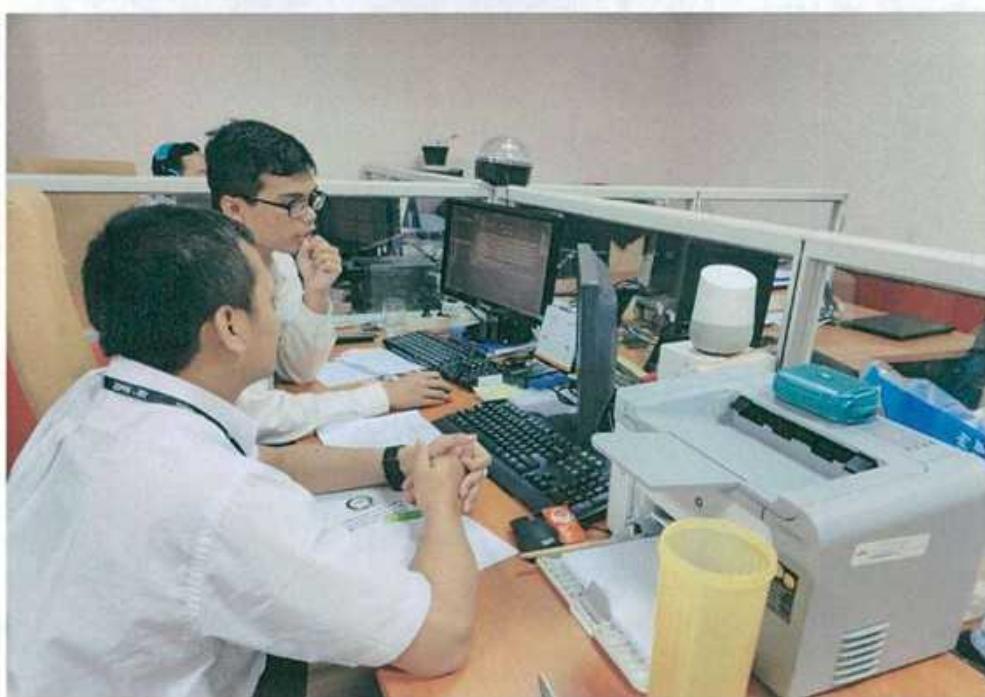
O. LAMPIRAN 15

Input Data sesuai jenis periode, pengolahan data di dalam aplikasi peta risiko:



P. LAMPIRAN 16

Foto Finalisasi Aplikasi Peta Risiko Tahap I dengan BDTI:



Q. LAMPIRAN 17

Bimbingan Kedua Bu Henny:



R. LAMPIRAN 18

Foto Finalisasi Aplikasi Peta Risiko Tahap II dengan BDTI:



S. LAMPIRAN 19

Foto Uji Coba Peta Risiko:



Form Evaluasi :

KUESIONER KEPUASAN AUDITOR INSPEKTORAT II TERHADAP APLIKASI PETA RISIKO AREA PENGAWASAN INSPEKTORAT II

Nama : _____

Jabatan : _____

Jenis Kelamin : _____

Pekerjaan : _____

Keterangan Pengisian

Jawablah pertanyaan berikut dengan memberikan tanda silang (X) pada kotak yang bersi kolom yang tersedia

Kepuasan Auditor

SB (Skor 4) = Sangat Baik

B (Skor 3) = Baik

KB (Skor 2) = Kurang Baik

TB (Skor 1) = Tidak Baik

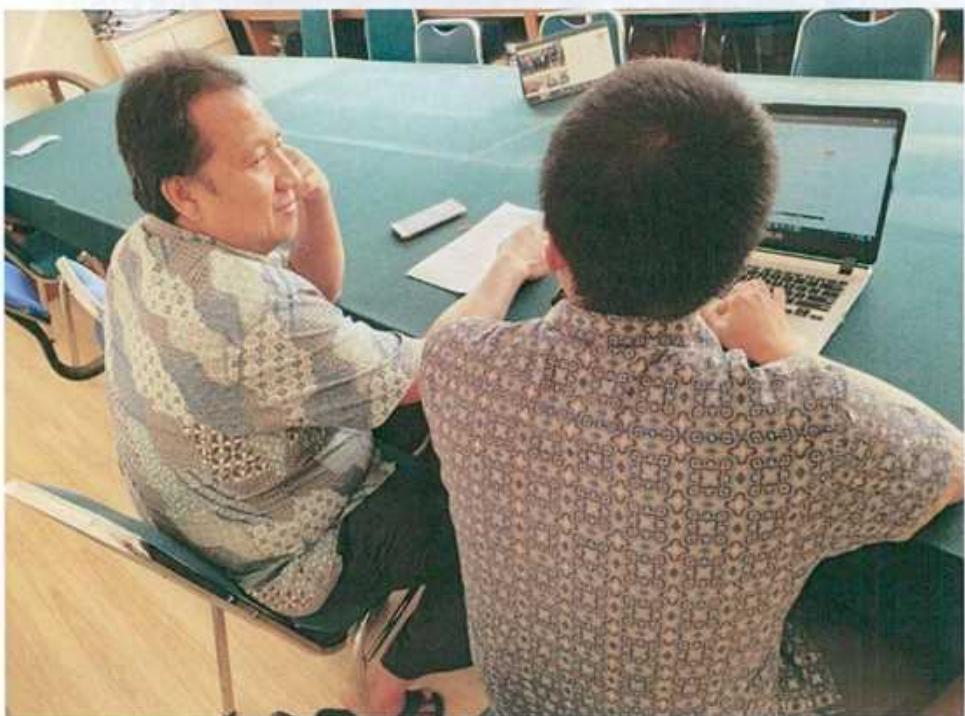
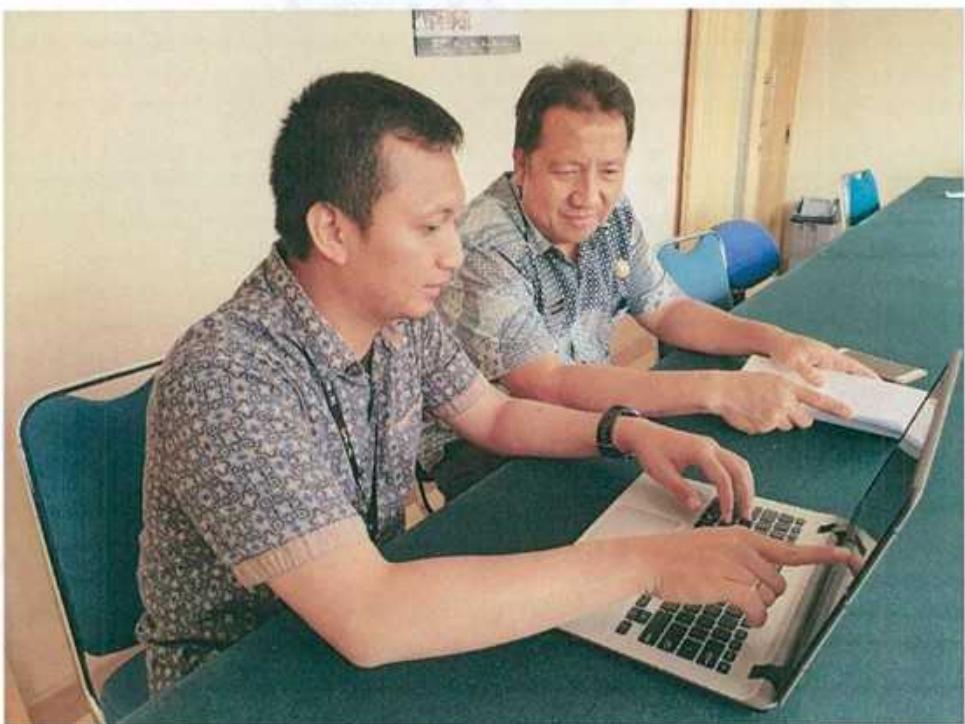
No	Kriteria	Skor
1	Tampilan Aplikasi Peta Risiko	
2	Kemudahan Pengoperasian	
3	Efisiensi Penginputan Data	
4	Banyaknya Perilaku Waktu	
5	Manfaat Ke Dalamnya	

Berikan saran Anda untuk meningkatkan kelengkapan informasi yang diberikan oleh aplikasi ini?

User Response:

T. LAMPIRAN 20

Foto Menerima dan Menganalisa Hasil Evaluasi Yang Telah Diisi:



Form Evaluasi Yang Telah Diisi oleh Auditor Inspektorat II

KUESIONER KEPUASAN AUDITOR INSPEKTORAT II TERHADAP APLIKASI PETA RISIKO PENGAWASAN INSPEKTORAT II

Nama : Deny Raniwidya
Jabatan : Auditor Mack
Jenis Kelamin : Pria
Pekerjaan : PNS

Keterangan Pengisian

Jawablah pertanyaan berikut dengan memberikan tanda silang (X) pada kotak yang berisi kolom yang tersedia

Kepuasan Auditor

SB (Skor 4) = Sangat Baik

B (Skor 3) = Baik

KB (Skor 2) = Kurang Baik

TB (Skor 1) = Tidak Baik

No	Kriteria	Skor
1	Tampilan Aplikasi Peta Risiko	4
2	Kemudahan Pengoperasian	4
3	Efisiensi Penginputan Data	1
4	Banyaknya Periode Waktu	3
5	Manfaat Ke Depannya	4

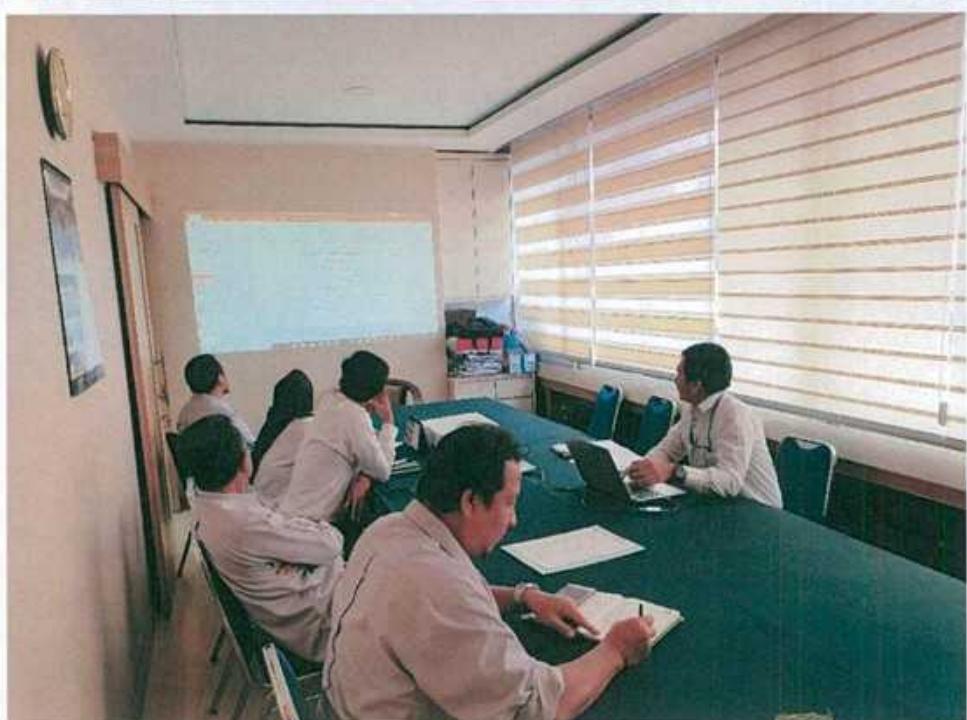
Berikan saran Anda untuk meningkatkan kelengkapan informasi yang diberikan oleh aplikasi ini?

User Response:

- Perbaikkan filter dalam kriteria agar simpulan data lebih variatif dan informatif

U. LAMPIRAN 21:

Foto Kegiatan:



Undangan Rapat:



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : IP/226/VIII/2019

22 Agustus 2019

Sifat : Biasa

Derajat: Segera

Perihal : Undangan

Yth.

1. Inspektur I
2. Kepala Bagian TU Inspektorat Utama
3. Para Kasubag TU Inspektorat Utama
4. Auditor Inspektorat II
5. JFU Inspektorat Utama

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Jakarta

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada pertemuan
yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 26 Agustus 2019

Pukul : 10.00 WIB

Acara : Sosialisasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II

Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapan terima kasih.

Plt. Inspektur II


Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 196207191988031001

Absensi Rapat:



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Waktu : Pkl. 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II
Acara : Sosialisasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. SETYANTA NUGRAHA, M.M.	INSPEKTUR UTAMA	
2.	Dr. DEWI BARLIANA S., M.Psi., QIA.	INSPEKTUR I	
3.	HANAFIAH, S.Sos.	KABAG TU ITAMA	
4.	LILFA NURFAJAR, S.E., M.A.B.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	
5.	AFNIWATY TANJUNG, S.E., M.E.	KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN	
6.	TIMBANG SUPRIYANTO, S.Sos.	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
7.	ENDEN ADIPATI KOMA, S.E., M.A.P.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
8.	DENI WIBISONO, S. Hut., M. Si., Cr.A.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
9.	NURHARIYANI S.E., M.M.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
10.	DENNY RAMADON, S.E.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
11.	HASNELSON, SH.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
12.	TARYONO, S.A.P.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
13.	MARGARETHA SUSANTI, S.E.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
14.	FAISAL RIYADI, S.E.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
15.	FITRIYANI LESTARI, S.E.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
16.	MUFTI PIKRI NUR FAUZI, A. Md.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
17.	PUTRI WIDYASARI NOVIYANTO, A. Md.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
18.	RETI ARDIYANTI, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBUAKAN	
19.	SRI NASTITI TRI NURASIH, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBUAKAN	
20.	HARYANTI	PENYUSUN BAHAN KEBUAKAN	

21.	ANA MUTA'AFFIF.	PENGADMINISTRASI UMUM	
22.	INDAH TUSILA WATI	PENGADMINISTRASI UMUM	
23.	MUHAMAD ALI, S.Sos.	PENGELOLA DATA	
24.	SURETIANTO, S.Kom.	PENGELOLA DATA	
25.	ANTONIUS DERYAL G., S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
26.	ALISA FATIMAH, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
27.	DYATRI MICKY ANGGRITA, S.I.P.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
28.	MUHAMMAD ILHAM ANTARIKSA, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
29.	ZELKA SEVRINA, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
30.	ZAHRA WANISA, S. IAN.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
31.	ARIZAL MASHUDI, A.Md	PENGELOLA DATA	
32.	MIRHAIL MUHAMAD JIBRIL, A.Md., Ak.	PENGELOLA DATA	
33.	REZA PRISCHA NANDA, A.Md	PENGELOLA DATA	
34.	FIROSA SIRESIA, S.E.	PENGELOLA DATA	
35.	ISFANDI MULYANA	PENGELOLA DATA	
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			

Laporan Singkat:



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT
SOSIALISASI PENYUSUNAN APLIKASI PETA RISIKO INSPEKTORAT II
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Hari/tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II, Gedung Setjen dan BK DPR RI, Lantai 5
Acara : Sosialisasi Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Inspektorat II
Ketua Rapat : Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P (Auditor Ahli Madya Inspektorat II)
Penyaji : Faisal Riyadi (Auditor Ahli Pertama Inspektorat II)
Hadir :
1. Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat II
2. Rekan-Rekan Tata Usaha Inspektorat II
3. Rekan-Rekan CPNS

PENDAHULUAN

1. Rapat dimulai Pada Hari Senin, 26 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB dibuka oleh Bapak Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P
2. Kemudian dilanjutkan dengan:
 - a. Ketua Rapat menyampaikan beberapa kata pengantar sebagai berikut:
 - 1) Sebagai tahapan menuju pengangkatan CPNS, Sdr. Faisal Riyadi harus melalui pelatihan dasar, yang dalam pelaksanaan akhir diwajibkan untuk membuat laporan aktualisasi.
 - 2) Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tahap terakhir dari rencana kegiatan aktualisasi sdr. Faisal Riyadi.
 - 3) Kegiatan aktualisasi sdr. Faisal Riyadi sudah diimplementasikan pada masa habituasi selama 30 hari Bulan Juli-Agustus 2019.

-
- 4) Sosialisasi dilaksanakan agar para auditor mengetahui output akhir dari kegiatan aktualisasi sdr. Faisal Riyadi, yaitu aplikasi peta risiko pada area pengawasan Inspektorat II serta memahami pengoperasian dari aplikasi tersebut.
 - 5) Tahapan selanjutnya, Sdr. Faisal Riyadi akan menjalani siding akhir pelatihan dasar CPNS 2019 yang rencananya akan dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada tanggal 2-4 September 2019.
 - 6) Koordinator rapat kemudian mempersilahkan Sdr. Faisal Riyadi untuk menyampaikan hasil aktualisasi yang sudah dilaksanakan pada masa habituasi selama 30 hari di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
- b. Faisal Riyadi Auditor Ahli Pertama Inspektorat II menyampaikan :
- 1) Kegiatan aktualisasi telah dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada masa habituasi selama jangka waktu 30 hari.
 - 2) Pada saat pelaksanaan, ada beberapa tahapan yang mengalami perubahan target waktu di timeline, menyesuaikan dengan dinamika dan loat pekerjaan yang ada di Lingkungan Inspektorat II maupun Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
 - 3) Penyusunan Aplikasi Peta Risiko telah selesai dilaksanakan, melalui proses koordinasi dengan para stakeholder, yaitu Bidang Data dan Informasi (BDTI), Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Kepegawaian serta Lingkungan Inspektorat Utama itu sendiri.

4) Berikut adalah capaian kegiatan aktualisasi yang sudah disusun dalam bentuk Tabel:

Milestone	No	Kegiatan Utama	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
Rapat dengan Internal Inspektorat II	1	Presentasi singkat rancangan kegiatan di hadapan Bpk. Inspektur Utama	Selasa, 23 Juli 2019	Lampiran 1 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan
	2	Pembuatan Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan dan sudah ditandatangani oleh Bpk. Inspektur Utama	Selasa, 23 Juli 2019	Lampiran 2 <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Aktualisasi
	3	Bimbingan Pertama dengan coach Ibu Heny Widyaningsih	Selasa, 23 Juli 2019	Lampiran 3 <ul style="list-style-type: none"> • Kartu Kendali • Foto Kegiatan
	4	Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II	Kamis, 25 Juli 2019	Lampiran 4 <ul style="list-style-type: none"> • Undangan Rapat • Absensi Rapat • Laporan Singkat Rapat • Bahan Rapat • Foto Kegiatan
Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)	5	Rapat Koordinasi dengan BDTI terkait Rancangan Aktualisasi CPNS Angkatan 2	Selasa, 23 Juli 2019	Lampiran 5 <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Singkat • Foto Kegiatan
	6	Mengirim rancangan aplikasi peta risiko ke BDTI cc. Sasmito	Selasa, 30 Juli 2019	Lampiran 6 <ul style="list-style-type: none"> • Screenshot Email
Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan aplikasi peta risiko	7	Membuat dan mengirimkan surat permintaan data Anggaran yang dikelola oleh 10 biro di bawah pengawasan Inspektorat II ke Biro Perencanaan dan Keuangan	Senin, 29 Juli 2019	Lampiran 7 <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permintaan Data
	8	Membuat dan mengirimkan surat	Senin, 29 Juli 2019	Lampiran 8

	permintaan data Analisis Beban Kinerja (ABK) ke Biro Kepegawaian		<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permintaan Data
9	Membuat dan mengirimkan surat permintaan pembuatan akun cloud ke Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) untuk Inspektorat II	Rabu, 31 Juli 2019	Lampiran 9 <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permintaan Pembuatan Cloud Inspektorat II
10	Penerimaan data ABK 2017-2019	Jumat, 2 Agustus 2019	Lampiran 10 <ul style="list-style-type: none"> • Screenshot Email • Data ABK 2017-2018
11	Koordinasi dengan TU ITTAMA terkait Aplikasi Peta Risiko dan Permintaan data TLHP BPK	Kamis, 8 Agustus 2019	Lampiran 11 <ul style="list-style-type: none"> • Data TLHP BPK • Foto Kegiatan
12	Penerimaan Data Pagu Anggaran dari Aplikasi Sincan Perencanaan cc. Mas Deni	Kamis, 15 Agustus 2019	Lampiran 12 <ul style="list-style-type: none"> • Data Pagu Anggaran 10 Biro/Unit/Pusat di Bawah Pengawasan Inspektorat II • Screenshot Data
Membuat peta risiko beserta aplikasi pendukungnya	13 Pelaksanaan Pembuatan Cloud Irida	Kamis, 8 Agustus 2019	Lampiran 13 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan
	14 Rapat Pemaparan Hasil Pekerjaan Aktualisasi oleh BDTI	Rabu, 7 Agustus 2019	Lampiran 14 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan
	15 Input data sesuai jenis periode, pengolahan data di dalam aplikasi peta risiko	Rabu, 7 Agustus 2019	Lampiran 15 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan
	16 Finalisasi Aplikasi Peta Risiko Tahap I dengan BDTI	Kamis, 8 Agustus 2019	Lampiran 16 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan
	17 Bimbingan Kedua Bu Henny	Jumat, 9 Agustus 2019	Lampiran 17 <ul style="list-style-type: none"> • Kartu Kendali

				<ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan
	18	Finalisasi Aplikasi Peta Risiko Tahap II dengan BDTI	Selasa, 13 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 18 • Foto Kegiatan
Melakukan uji coba dan evaluasi peta risiko beserta aplikasi pendukungnya	19	Uji coba peta risiko	Kamis, 22 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 19 • Foto Kegiatan •
	20	Pembuatan dan penyebaran form evaluasi	Kamis, 22 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 20 • Form Evaluasi Kepuasan Aplikasi Peta Risiko • Foto Kegiatan
	21	Menerima hasil evaluasi yang telah disi	Kamis, 22 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 21 • Foto Kegiatan
	22	Menganalisa hasil evaluasi	Kamis, 22 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 22 • Foto Kegiatan
Melaporkan hasil akhir kegiatan	23	Sosialisasi materi aplikasi peta risiko di Lingkungan Inspektorat II	Senin, 26 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 23 • Undangan Rapat • Absensi Rapat • Laporan Singkat • Foto Kegiatan

- 5) Dari 23 capaian kegiatan aktualisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Nasionalisme).
- 6) Aplikasi Peta Risiko dapat diakses dengan cara membuka portal.dpr.go.id, lalu buka aplikasi Siratu, selanjutnya klik Aplikasi Peta Risiko yang berada di sub kiri aplikasi Siratu.
- 7) Aplikasi Peta Risiko ini terdiri dari 3 faktor risiko, yang terdiri dari Anggaran yang dikelola, selisih gap antara jumlah kebutuhan pegawai dengan pemangku kepentingan, serta tindak lanjut hasil permeriksaan

BPK (TLHP) pada 10 biro yang berada di bawah area pengawasan Inspektorat II.

- 8) BDTI menjelaskan bahwa sebaiknya aplikasi peta risiko memang diintegrasikan ke dalam aplikasi yang sudah ada di unitnya masing-masing, dalam hal ini adalah aplikasi Siratu yang merupakan produk dari Inspektorat Utama, itulah alasan utama kenapa aplikasi peta risiko terintegrasi dengan aplikasi Siratu.
 - 9) Pada pelaksanaan uji coba aplikasi peta risiko, para pimpinan dan auditor di unit Inspektorat II sangat mengapresiasi terhadap aplikasi tersebut.
3. Kesimpulan Hasil Sosialisasi Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II, yaitu:
- a) Jajaran Inspektorat II sudah mengetahui mengenai output akhir dari kegiatan aktualisasi sdr. Faisal Riyadi, yaitu Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II.
 - b) Aplikasi ini akan sangat berguna sebagai landasan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta pelaksanaan audit yang berbasis risiko.
 - c) Langkah menuju Internal Audit Capability Model (IACM) level 3 pun semakin terbuka, karena salah satu syaratnya adalah adanya pengelolaan dan pelaksanaan audit yang berbasis risiko.
 - d) Mempermudah dalam pelaksanaan identifikasi risiko dari setiap unit
 - e) Pengembangan terhadap aplikasi ini masih sangat terbuka lebar terutama dalam penambahan faktor risiko yang akan sangat mungkin bertambah kedepannya.

- f) Dukungan dari para auditor di unit Inspektorat II akan sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan tepat guna dari aplikasi peta risiko yang sudah disusun oleh sdr. Faisal Riyadi.
- g) Aplikasi Peta Risiko tersebut akan sangat menunjang kinerja auditor Inspektorat II pada khususnya dan Inspektorat Utama pada umumnya.
3. Rapat ditutup pada Pukul 12:15 WIB.

Jakarta, 26 Agustus 2019
Ketua Rapat


Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P.
NIP.196907151999031004

DOKUMENTASI KEGIATAN:



TAMPILAN APLIKASI PETA RISIKO

The image shows two windows of the SIRATU application:

Daftar Kriteria Risiko (Risk Criteria List):

Kriteria Risiko	Bobot	Bobot Rata-rata
1. Inisiatif Kepala	0,071 (48,87)	
2. Kunci Tujuan dan Menghindari	0,071 (58,07)	
3. Konsistensi	0,071 (49,87)	

Edit Kriteria Risiko (Edit Risk Criteria):

Form fields for editing a risk criterion:

- Kriteria Risiko:** Bobot Kepala
- Bobot:** 0,071 (48,87)
- Bobot Rata-rata:**
- Simpan** (Save) button

